



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PENGARUH KOORDINASI DAN KOMUNIKASI CAMAT  
TERHADAP EFEKTIVITAS KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN BUKIT INTAN  
KOTA PANGKALPINANG

TAPM ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains (M.Si) Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun oleh:

AKHMAD KARNOLUS

NIM : 016761371

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

TAHUN 2012

**PENGARUH KOORDINASI DAN KOMUNIKASI CAMAT TERHADAP  
EFEKTIVITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG**

Oleh:

**AKHMAD KARNOLUS**

[begocodut@yahoo.co.id](mailto:begocodut@yahoo.co.id)

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

**ABSTRACT**

**Key Words:** Coordination, Communication, Effectiveness

This study aims to determine whether there is significant coordination and communication to the effectiveness of the public peace and order in the district of Bukit Intan Pangkalpinang city.

The research method of data using questionnaires, descriptive statistics and multiple linear regression analysis of the 99 respondents in the sample of the study population. This study is a quantitative descriptive research conducted to answer the hypothesis that there is no significant effect between head districts coordination and communication to the effectiveness of the public peace and order in the district of Bukit Intan Pangkalpinang city.

Hypothesis test results indicate that communication and coordination district have significant positive impact on the effectiveness of peace and order either partially indicated by tcount of 2.193 and 0.031 for variable significance of coordination, while the communication variables indicated by tcount of 5.331 and a significance of 0.000. Coordination and communication simultaneously significant positive effect on the effectiveness of peace with Fcount value of 42.613 and a significance value of 0.000.

The conclusion that can be drawn from this study that the coordination and communication plays an important role to achieve the effectiveness of the work for a Head in carrying out their duties in the field of governance, and social development. Specialized in the field of peace and order, coordination and communication major effect on the effectiveness of public peace and order in the district town of Bukit Intan Pangkalpinang.

## ABSTRAK

**Kata kunci:** Koordinasi, Komunikasi, Efektivitas

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara koordinasi dan komunikasi terhadap efektivitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang.

Metode penelitian data menggunakan kuesioner, statistik deskriptif dan analisis regresi liner berganda terhadap 99 responden sebagai sampel populasi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan dilakukan untuk menjawab hipotesis yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara koordinasi dan komunikasi camat dengan efektivitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi camat berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas ketenteraman dan ketertiban baik secara parsial ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,193 dan signifikansi sebesar 0,031 untuk variabel koordinasi, sedangkan variabel komunikasi ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,331 dan signifikansi sebesar 0,000. Koordinasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas ketenteraman dengan nilai  $f_{hitung}$  sebesar 42,613 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa koordinasi dan komunikasi memegang peranan penting untuk mencapai hasil efektivitas kerja bagi seorang Camat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Khusus dalam bidang ketentraman dan ketertiban, koordinasi dan komunikasi berpengaruh besar terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang.

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

**TAPM** yang berjudul **PENGARUH KOORDINASI  
DAN KOMUNIKASI CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN BUKIT INTAN  
KOTA PANGKALPINANG**

adalah

**Hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber  
yang dikutip maupun dirujuk telah  
saya nyatakan dengan benar  
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan  
Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya  
Bersedia menerima sanksi akademik**

**Pangkalpinang, 20 Nopember 2012**

**Yang menyatakan,**



**Akhmad Karnolus**

**NIM: 016761371**

LEMBAR PERSETUJUAN

TAPM

PENGARUH KOORDINASI DAN KOMUNIKASI CAMAT  
TERHADAP EFEKTIVITAS KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT MASYARAKAT  
DI KECAMATAN BUKIT INTAN  
KOTA PANGKALPINANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ahmad Karnolus

016761371

Menyetujui

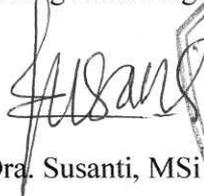
Pembimbing I Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM .....

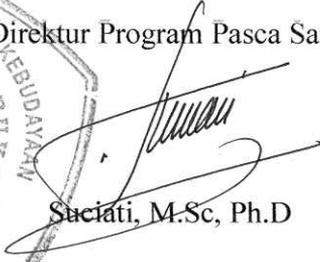
Pembimbing II Dr. Maman Rumanta, MSi .....

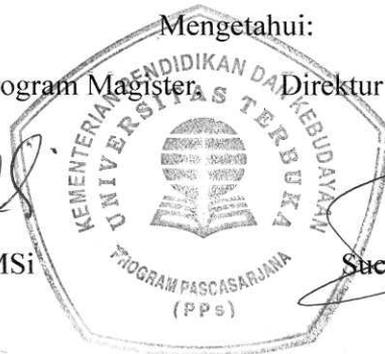


Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister, Direktur Program Pasca Sarjana,

  
Dra. Susanti, MSi

  
Suciati, M.Sc, Ph.D



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Akhmad Karnolus.  
 NIM : 016761371.  
 Proram Studi : Administrsi Publik.  
 Judul Tesis : PENGARUH KOORDINASI DAN KOMUNIKASI CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATANBUKIT INGAN KOTA PANGKALPINANG

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/15 Desember 2012.  
 Waktu : 08.00 – 10.00 Wib.

Dan telah dinyatakan **LULUS**.

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Komisi Penguji : .....  
 : Drs. Syarif Fadilah, M.Si.

Penguji Ahli : .....  
 : Prof.Dr. Aries Djaenuri, MA.

Pembimbing I : .....  
 : Prof.Dr.H. Slamet Widodo, MS,MM.

Pembimbing II : .....  
 : Dr. Maman Rumeanta, M.Si.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini .

Penulisan TAPM ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang selaku penyelenggara program Pasca Sarjana;
3. Pembimbing I Prof. Dr. H Slamet Widodo, MS, MM dan Pembimbing II Dr.Maman Rumanta, MSi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Kabid ISIP selaku penanggung jawab program Pascasarjana;
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas semua kebaikan kepada yang telah membantu saya dalam penulisan ini.

Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan,  
amin.

Pangkalpinang, Nopember 2012

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul .....	i
Abstrak .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iv
Lembar Pernyataan .....	v
Lembar Pengesahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori .....	12

1. Pengertian Koordinasi .....	12
2. Tehnik-tehnik Koordinasi .....	14
3. Prinsip-prinsip Koordinasi .....	19
4. Pengertian Komunikasi .....	22
5. Pengertian Efektivitas .....	30
6. Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang .....	38
B. Kerangka Berfikir .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Desain Penelitian .....	49
B. Rumusan Hipotesis .....	49
C. Populasi dan Sampel .....	50
1. Populasi .....	50
2. Sampel .....	51
D. Instrumen Penelitian .....	53
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	56
F. Metode Analisa Data .....	57
G. Uji Instrumen Penelitian .....	58
1. Uji Validitas .....	58
2. Uji Reliabilitas .....	58
H. Diskriptif Data .....	58
I. Analisa regresi berganda .....	59
1. Uji Asumsi Klasik .....	59
a. Uji normalitas .....	59

b. Multikolinieritas .....	60
c. Heteroskedasitas .....	60
2. Uji Regresi .....	60
a. Uji t .....	61
b. Uji F .....	61
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Diskripsi Lokasi Penelitian .....	62
1. Batas administrasi .....	62
2. Luas wilayah .....	63
3. Topografis .....	64
4. Demografis .....	65
5. Eselonisasi organisasi kecamatan .....	66
6. Tugas dan fungsi satuan organisasi kecamatan .....	67
B. Karakteristik Responden .....	71
C. Uji Instrumen Penelitian .....	74
1. Uji validitas .....	74
2. Uji reliabilitas .....	76
D. Pengaruh antar Variabel .....	77
1. Deskriptif Data .....	77
2. Uji Asumsi Klasik .....	97
a. Uji normalitas .....	97
b. Uji multikolinieritas .....	99
c. Uji heteroskedasitas .....	100

3. Uji Hipotesis .....	101
a. Regresi linier berganda .....	101
b. Uji t .....	102
c. Uji F .....	103
4. Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban .....	104
5. Pengaruh Komunikasi terhadap Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban .....	105
6. Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi terhadap Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban .....	106
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Surat Ijin Penelitian	
Struktur Organisasi	
Kuesioner	
Hasil Penilaian kuesioner	
Hasil Wawancara	

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Titik Koordinasi Ideal .....	12
Gambar 2.2 Gambar Skematis Johari Window .....	27
Gambar 2.3 Model Hubungan antara Koordinasi dan komunikasi dengan Efektivitas tingkat Ketentraman dan ketertiban Masyarakat .....	48
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Koordinasi .....	97
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Komunikasi .....	98
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Efektivitas .....	99
Gambar 4.4 Hasil Plot Normal .....	100

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang dari tahun 2009-2011 .....	7
Tabel 2.1 Beberapa Faktor untuk mengetahui Tingkat Kinerja Pegawai .....	40
Tabel 3.1 Variabel Operasional Penelitian .....	54
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kelurahan di wilayah kecamatan Bukit Intan .....	64
Tabel 4.2 Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan dalam Kecamatan Bukit Intan .....	66
Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	71
Tabel 4.4 Uji Validitas Koordinasi .....	74
Tabel 4.5 Uji Validitas Komunikasi .....	75
Tabel 4.6 Uji Validitas Efektivitas .....	75
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas-Koefisien Alpha .....	76
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Koordinasi .....	78
Tabel 4.9 Koordinasi Melalui Kewenangan .....	78
Tabel 4.10 Koordinasi Melalui Kewenangan .....	80
Tabel 4.11 Koordinasi melalui Pedoman Kerja .....	81
Tabel 4.12 Koordinasi Melalui Konferensi .....	82

Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Komunikasi .....	84
Tabel 4.14 Kridibilitas Sumber .....	85
Tabel 4.15 Daya Tarik Sumber .....	86
Tabel 4.16 Kekuatan Sumber .....	87
Tabel 4.17 Statistik Deskriptif Efektivitas .....	89
Tabel 4.18 Dimensi Produksi .....	89
Tabel 4.19 Dimensi Efisiensi .....	91
Tabel 4.20 Dimensi Kepuasan .....	92
Tabel 4.21 Dimensi Keadaptasian .....	94
Tabel 4.22 Dimensi Kelangsungan Hidup .....	95
Tabel 4.23 Hasil Uji Multikolinieritas .....	99
Tabel 4.24 Hasil Analisa Regresi Linier Berganda .....	101
Tabel 4.25 Hasil Uji t .....	102
Tabel 4.26 Hasil Uji F .....	103

UNIVERSITAS TERBUKA



Lampiran 16 Hasil Wawancara dengan Responden ..... 137

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sekarang ini merupakan suatu usaha mencapai tujuan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Tujuan itu diharapkan agar lebih memperkokoh semangat perjuangan guna menyelamatkan dan merealisasikan program pemerintah dan sejalan dengan tujuan nasional seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 alinea ke IV yaitu:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social....

Pencapaian tujuan nasional ini merupakan hak dan kewajiban serta kehormatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan selalu bahu membahu untuk mencipatakan hal itu sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Berbagai macam tugas dan profesi yang ada seluruhnya mempunyai andil yang sangat besar dalam pembangunan negara kita.

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 menyatakan bahwa:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya berdasarkan perubahan kedua UUD 1945, pasal 18 (Setjen MPR RI, 2006:15) ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang.

Realisasi dari pasal 18 UUD 45 saat ini diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 2 sebagai berikut:

- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- (4) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Daerah (Bupati/Walikota) tidak akan dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, melainkan sebagian kewenangannya dapat dilimpahkan kepada perangkat yang ada setingkat dibawahnya yaitu Camat. Pemerintah Kecamatan adalah unsur pemerintah daerah terdepan yang mempunyai kedudukan yang strategis karena dapat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan sebagian besar akan ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah kecamatan yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang Camat.

Kemampuan administrasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas pada saat ini yang begitu kompleks. Kemampuan administrasi ini dapat berupa suatu ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari oleh aparatur negara karena merupakan suatu pengetahuan yang berdiri sendiri (Uchjana , 2009). Hal ini dikarenakan:

1. Sebagai disiplin ilmu, administrasi memiliki objek material yaitu manusia, artinya melihat dari pokok masalah yang dibahas maka

manusia adalah sosok yang dibahas. Namun demikian ilmu pengetahuan ini akan berhubungan erat pula dengan ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu hukum, ilmu jiwa, ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan lainnya.

2. Administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek formal dalam arti sudut pandangnya adalah penyelenggaraan. Baik penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan yang terencana tersebut. Rangkaian penyelenggaraan inilah diperlukan pengendalian berbagai kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sejak semula.
3. Sebagai Ilmu, administrasi diterima secara universal di seluruh dunia walaupun kemudian dilihat dari corak berfikir (paradigma) terdapat berbagai kutub yang saling bertolak belakang.
4. Sebagai ilmu administrasi juga dapat dipelajari dan diajarkan sehingga berbagai perguruan tinggi mendirikan berbagai jurusan dan kajian administrasi pada berbagai strata, bahkan pada beberapa perguruan tinggi didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) sebelum menjadi universitas.
5. Ilmu administrasi juga mempunyai sistematika yang khas, bahkan sistem administrasi suatu Negara tidak sama dengan sistem administrasi Negara lain. Selain itu, suatu Negara terkadang memiliki suatu sistem administrasi yang berubah sesuai ruang dan waktu.

Administrasi itu juga disebut seni karena administrasi Negara itu memiliki cipta, rasa dan karsa seorang administrator. Cipta, rasa dan karsa itu mempengaruhi rakyatnya, membuat perubahan administrasi secara baik, benar dan indah penyelenggaraannya, rekayasa keadaan yang mengikat tanpa paksaan. Administrasi memiliki seni merencanakan, seni membiayai, seni mengatur, seni mengurus, seni menyelenggarakan berbagai kegiatan baik rutin maupun insidental.

Sebagian besar rakyat Indonesia pada saat sekarang ini lebih terfokus pada situasi politik negara dan keadaan ekonomi yang sedang mengalami krisis hingga saat ini. Pembangunan dapat terlaksana dengan baik apabila adanya keselarasan pelaksanaan pembangunan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diarahkan untuk mengembangkan daerah serta menserasikan laju pertumbuhan pembangunan.

Teori otonomi daerah yang dapat kita lihat pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 menggunakan *sistem otonomi model* yang menggabungkan implementasi Desentralisasi dan Dekonsentrasi dalam satu institusi. Sistem ini dapat dilihat dari adanya wilayah administrasi di tingkat provinsi yang juga daerah otonomi tingkat I, begitu juga di tingkat kabupaten/kota sekaligus juga daerah otonim tingkat II (Sumantri dan Wasistiono, 2003:84).

Perubahan tentang kedudukan dan kewenangan camat, dapat dilihat pada UU No.22 tahun 1999 yang diganti dengan UU No.32 tahun 2004. Peran dekonsentrasi hanya dilaksanakan pada tingkat provinsi, kecuali kewenangan

utama dari pemerintah pusat. Perubahan tersebut secara nyata mempengaruhi kedudukan bagi pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat. Pada UU No.5 tahun 1974, kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, sedangkan menurut UU No.22 tahun 1999 maupun UU No.32 tahun 2004, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Ketentraman dan ketertiban suatu wilayah sangatlah penting artinya bagi keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tenteram dan tertib dalam suatu wilayah, diperlukan suatu kesadaran dan kepastian hukum dari seluruh lapisan masyarakat. Di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang, kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat masih sangat rendah, kemungkinan besar hal ini dikarenakan lokasinya berada di ibukota provinsi kepulauan Bangka Belitung yang aktifitasnya berkesinambungan dan juga merupakan kawasan jalur alternatif lalu lintas Pangkalpinang Timur menuju kota Pangkalpinang. Tindakan kejahatan dapat terjadi dan hal ini dibuktikan dengan angka kejahatan di kecamatan Bukit Intan yang memiliki angka ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tinggi. Berdasarkan observasi awal dan diperkuat dengan data yang diperoleh di Polsek Bukit Intan dari tahun 2009 s.d 2011. Untuk satu kecamatan, menurut peneliti kejadian tersebut tidak wajar dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di kota Pangkalpinang dan hasil observasi dari pengamatan di lapangan menunjukkan tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut sangat rendah.

Tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1. Keadaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Dari Tahun 2009 s.d. 2011**

No	Jenis Kejadian	Tingkat Ketentraman & Ketertiban		
		Th 2009	Th 2010	Th 2011
1	Pembunuhan	1	3	3
2	Pemeriksaan	2	2	2
3	Pencurian Pemberatan/Kekerasan	18	29	25
4	Pencurian Kendaraan Bermotor (R.2/R.4)	34	28	37
5	Pengedar obat terlarang	26	33	30
6	Pemakai obat terlarang	38	36	38
7	Pengrusakan	14	17	18
8	Penganiayaan	6	8	7
9	Penipuan	10	12	26
10	Penggelapan	6	11	19
	Jumlah	155	179	205

**Sumber : Polsek Bukit Intan Tahun 2011**

Data pada tabel 1.1 menunjukkan peningkatan tingkat ketentraman dan ketertiban di kecamatan Bukit Intan pada tahun 2011 berbanding tahun 2010 sebesar 0,95%. Tingkat ketentraman dan ketertiban pada tahun 2010 berbanding tahun 2009 memiliki persentase sebesar 15,48%, sedangkan pada tahun 2011 berbanding tahun 2010 tingkat ketentraman dan ketertiban memiliki persentase sebesar 14,52%. Kenaikan tingkat ketentraman dan ketertiban ini disebabkan menurunnya beberapa tindakan kekerasan pengedar obat terlarang serta tindakan penganiayaan. Namun kenaikan tingkat ketentraman dan ketertiban ini tidak signifikan mengingat beberapa tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban malah mengalami peningkatan yang cukup tinggi seperti tindakan pencurian kendaraan bermotor serta penipuan. Kondisi ini

memberikan gambaran bahwa masih kurangnya pembinaan ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh Camat, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih besar.

Camat dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait. Instansi yang terkait yang berada di kecamatan adalah Polsek atau Kepolisian Sektor. Camat juga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kasi Trantib yang bertugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan umum terutama di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerahnya. Fungsi Koordinasi dan komunikasi tersebut tidak terlepas dari fungsi manajemen dan fungsi manajemen itu sendiri dapat dipandang sebagai suatu ilmu dan seni. Sebagai suatu ilmu bahwa manajemen itu dapat dipelajari dengan metode ilmiah, sedangkan seni melalui pendekatan-pendekatan.

Seorang Camat hendaknya memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas tugasnya sebagai Perangkat Daerah. Wewenang yang diberikan oleh atasannya yaitu Bupati atau Walikota dapat diterapkan secara efektif dengan kemampuan yang dimilikinya. Wewenang untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tentunya memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang handal dengan disiplin ilmu yang handal pula.

Faktor koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Camat masih dirasa sangat kurang terutama dengan diadakannya rapat koordinasi bulanan di kecamatan sekali dalam sebulan, padahal sebagai kecamatan di ibukota

provinsi kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban sering kali terjadi yang mengharuskan Camat untuk lebih sering berkoordinasi dengan Polsek maupun dengan masyarakatnya dengan lebih baik lagi. Koordinasi ini tidak terfokus dalam situasi yang resmi seperti rapat koordinasi kecamatan, tetapi koordinasi informal juga hendaknya dilakukan dengan baik oleh Camat. Masyarakat sangat mengharapkan bahwa seorang Camat itu selalu dekat dengan masyarakatnya sebab masyarakat merasa lebih mudah mengemukakan pendapat dalam situasi informal daripada dalam rapat yang bersifat resmi.

Komunikasi yang dilakukan oleh Camat juga masih sangat kurang karena sering kali Camat disibukkan oleh tugas-tugas rutin baik di kantor maupun di tingkat kota yang mengharuskan Camat untuk hadir dalam kegiatan rapat di tingkat kota. Kesibukan ini tentunya berpengaruh dengan usaha pendekatan yang dilakukan oleh Camat kepada masyarakatnya. Komunikasi yang dilakukan oleh Camat sangat terbatas dan sering kali Camat mewakilkan tugas-tugas itu kepada bawahannya baik sekretaris kecamatan maupun kasi trantib yang berada di kecamatan sehingga komunikasi yang dilakukan tidak efektif dan tidak mengenai sasaran. Masyarakat lebih menginginkan apa yang akan disampaikan diterima langsung oleh Camat bukan melalui wakilnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul: **“PENGARUH KOORDINASI DAN KOMUNIKASI CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG”**.

## B. Perumusan Masalah

Melihat kenyataan yang ada di kecamatan Bukit Intan khususnya mengenai tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah koordinasi yang dilaksanakan Camat dapat memberikan kontribusi terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya?
2. Apakah komunikasi yang dilaksanakan Camat dapat memberikan kontribusi terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya?
3. Apakah koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan Camat dengan aparat ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya dapat memberikan kontribusi terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Camat dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran dengan jelas mengenai pengaruh koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat terhadap ketentraman dan ketertiban diwilayahnya
2. Memberikan gambaran dengan jelas mengenai pengaruh komunikasi yang dilaksanakan oleh Camat terhadap ketentraman dan ketertiban diwilayahnya
3. Memberikan gambaran dengan jelas mengenai pengaruh koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Camat terhadap ketentraman dan ketertiban diwilayahnya.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Secara teoritis*, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Ilmu Administrasi Publik;
2. *Secara praktis*, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dua macam kepentingan, antara lain:
  - a. *Bagi Pemerintah Daerah* diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dan menjadi masukan dalam memecahkan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan.
  - b. *Bagi penulis*, penelitian ini sangatlah berguna untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik.

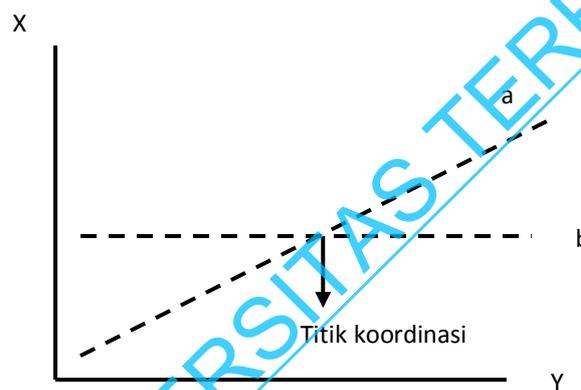
## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Koordinasi

Istilah koordinasi ini diambil dari bahasa Inggris “*coordination*” yang menurut kamus berarti “*being co-ordinate*”, yaitu adanya koordinat yang bersamaan dari dua garis yang berpotongan pada koordinat tertentu. Garis koordinat itu dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Titik Koordinasi Ideal**

Gambar di atas memperlihatkan adanya suatu titik yang memiliki ordinat-ordinat yang sama antara garis a dan garis b.

Uraian di atas menunjukkan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mensinkronkan suatu pekerjaan sehingga pada akhirnya tujuan akan tercapai dan dengan koordinasi kesatuan gerak akan dapat menjadi jaminan untuk menghindarkan diri dari ketumpangtindihan pekerjaan sehingga pada akhirnya tujuan akan tercapai secara efektif. Koordinasi juga merupakan rangkaian kegiatan atau usaha menghubungkan

sehingga tercapainya gerak langkah bersama dalam suatu organisasi atau suatu kerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Brech dalam buku Hasibuan (2005:86) mengemukakan bahwa koordinasi sebenarnya “upaya mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri”.

Menurut Siagian (2008:220) mendefinisikan sebagai berikut :

Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dan usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.

Sutarto (1980:130), menyatakan bahwa intisari koordinasi dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Koordinasi berintisarikan kesatuan tindakan atau kesatuan usaha;
- b. Koordinasi berintisarikan penyesuaian antara bagian;
- c. Koordinasi berintisarikan keseimbangan antara kesatuan;
- d. Koordinasi berintisarikan keselarasan;
- e. Koordinasi berintisarikan sinkronisasi.

Intisari koordinasi dari Sutarto (1980) yang telah dikemukakan diatas, memiliki makna sebenarnya adalah sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Handayaniingrat (1994:80) ”bahwa di dalam suatu koordinasi harus ada keseimbangan, keserasihan, keselarasan, kesatuan dan sinkronisasi menuju tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya”. Dari pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa di dalam usaha pencapaian tujuan bersama diperlukan adanya penyesuaian

setiap kegiatan dari masing masing bagian organisasi, sehingga kegiatan-kegiatan itu saling mengisi, melengkapi, terarah dan selaras untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

## 2. Tehnik tehnik Koordinasi

Tehnik-tehnik koordinasi pada aparat kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang dan instansi terkait lainnya adalah cara-cara yang dipergunakan untuk melaksanakan koordinasi secara efektif yang di dalam pelaksanaannya dapat dipilih atau ditetapkan sendiri oleh koordinator sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat melaksanakan tugas koordinasinya.

Implementasi dalam memahami tehnik-tehnik koordinasi ini, sebagaimana diuraikan oleh Handayani (1994:19) terdiri dari:

- a. Koordinasi melalui kewenangan;
- b. Koordinasi melalui konsensus;
- c. Koordinasi melalui pedoman kerja;
- d. Koordinasi melalui konferensi.

*Koordinasi melalui kewenangan* adalah merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Koordinasi yang demikian mungkin benar, apabila organisasi yang dikoordinasikan tersebut bersifat seragam (homogen). Di dalam kondisi yang homogen, koordinasi kewenangan dapat dijalankan secara efektif. Wewenang merupakan alat atau dasar hukum untuk bertindak dan wewenang juga merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang lain. Tanpa ada wewenang terhadap suatu pekerjaan, janganlah mengerjakan pekerjaan tersebut, karena tidak mempunyai dasar hukum

untuk melakukannya. Ada dua macam kewenangan yang perlu diketahui yaitu:

1) Sentralisasi wewenang

Sebagian besar kekuasaan masih tetap dipegang oleh pimpinan. Sentralisasi wewenang mengakibatkan pimpinan sibuk bekerja, sedangkan bawahan bekerja santai saja.

2) Desentralisasi wewenang

Sebagian kecil kekuasaan dipegang pimpinan, sedangkan sebagian besar kekuasaannya didelegasikan kepada bawahan. Dengan desentralisasi wewenang, pimpinan mempunyai banyak waktu untuk merencanakan, mengarahkan dan mengawasi bawahannya. Pimpinan yang cakap sering bersikap desentralisasi wewenang, karena sifat delegasi wewenang adalah *du characteristic*. *Du characteristic* adalah pihak bawahan menerima wewenang dari atasan, tetapi pada saat yang sama atasan yang bersangkutan tetap memiliki wewenang tersebut.

Pimpinan (delegator) tidak hilang haknya terhadap wewenang yang telah didelegasikan kepada bawahan (deleget), bahkan sewaktu-waktu dapat menarik kembali wewenang itu. Pimpinan harus menyadari bahwa dinamika suatu organisasi sebagian besar terletak pada pundaknya dan kreativitasnya sangat diperlukan untuk memimpin.

*Koordinasi melalui konsensus* dapat dilakukan dengan cara menggunakan kesepakatan yang telah terbentuk diantara anggota organisasi yang dikoordinasikan, misalnya:

1) Konsensus melalui motivasi

Motivasi yang dimaksud antara lain dapat berupa kepentingan bersama, nilai-nilai yang dimiliki bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai perasaan solidaritas berdasarkan atas kesetiakawanan yang dapat dipergunakan untuk menjamin kelancaran koordinasi terutama dalam organisasi besar dan kompleks yang mempunyai jenis dan fungsi yang beraneka ragam.

2) Konsensus melalui sistem timbal balik

Digunakan untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan organisasi dan tuntutan individual, baik yang bersifat material maupun non material.

3) Konsensus melalui ide

Dimaksudkan bahwa setiap orang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya dalam kesetuhan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi.

*Koordinasi melalui pedoman kerja*, yaitu bahwa setiap kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan, demikian pula tugas, wewenang, hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja merupakan landasan atau petunjuk dalam melaksanakan koordinasi.

*Koordinasi melalui konferensi* diartikan dengan rapat-rapat atau sidang-sidang yang dilakukan baik tingkat pimpinan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Tehnik tehnik koordinasi tersebut akan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan oleh pemimpin yang memiliki pengetahuan yang baik pula,

sebab seorang pemimpin adalah seseorang mampergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan merupakan gaya seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya agar mau bekerjasama dan bekerja efektif sesuai dengan perintahnya, sedangkan asas-asas kepemimpinan adalah bersikap tegas dan rasional, bertindak konsekuen serta berlaku adil dan jujur.

Koordinasi dapat berjalan dengan baik, perlu adanya suatu analisis pekerjaan. Analisis Pekerjaan adalah Informasi tertulis mengenai apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu organisasi baik pemerintahan maupun swasta agar tujuan tercapai (Hasibuan, 2005:29). Agar tujuan tercapai dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Menentukan penggunaan hasil informasi analisa pekerjaan* artinya penganalisa harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi itu, karena hasil informasi tersebut akan digunakan untuk menentukan jenis *job description*.
- b. *Mengumpulkan informasi tentang latar belakang* artinya menganalisa harus mengumpulkan dan mengkualifikasikan data dengan latar belakang yang ada dengan metode penelitian deskriptif, survey dan sampel, sedangkan tehnik pengumpulan datanya dengan cara wawancara, diagnosa dan diaplikasikan pada masa yang akan datang.
- c. *Menyeleksi muwakal jabatan yang akan dianalisa* artinya menganalisa harus memilih beberapa muwakal jabatan untuk dianalisa. Guna dilakukan itu adalah untuk menghemat biaya dan waktu.

- d. *Mengumpulkan informasi analisa pekerjaan* artinya penganalisa kemudian mengadakan analisa pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku anggota yang diperlukan, kondisi kerja dan syarat-syarat anggota yang akan melaksanakan pekerjaan.
- e. *Meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan* artinya analisa pekerjaan menyediakan informasi tentang hakekat dan fungsi pekerjaan. Informasi hendaknya diverifikasi dengan anggota yang akan melaksanakan pekerjaan itu serta atasan langsung pekerja. Gunanya adalah untuk menentukan kebenarannya dan melengkapinya secara faktual serta dapat dipahami secara mudah oleh semua pihak yang berkepentingan dan juga dapat memodifikasikan tugas dan pekerjaan.
- f. *Menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan* artinya menganalisa pekerjaan kemudian menyusun uraian pekerjaan, uraian jabatan dan evaluasi pekerjaan.
- g. *Memperhitungkan perkembangan lingkungan* artinya penganalisa juga harus memperhitungkan perkembangan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, perluasan pekerjaan atau penyederhanaan pekerjaan. Gunanya adalah untuk memperhitungkan kemampuan anggota untuk masa kini dan masa yang akan datang supaya mereka dapat tetap melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan penjelasan diatas, bahwa tehnik dalam menjalankan koordinasi adalah adanya pengawasan, hubungan pribadi yang luas, pertemuan kelompok serta menggunakan orang

penghubung yang turut membantu kelancaran koordinasi. Selanjutnya hal yang dapat disimpulkan oleh peneliti dari uraian tentang koordinasi ini adalah bahwa dengan berhasilnya pelaksanaan koordinasi yang baik akan dapat dicegah berbagai hambatan tugas atau pekerjaan yang disebabkan adanya kesimpangsiuran, tumpang-tindih atau duplikasi pekerjaan, pemborosan waktu, tenaga dan biaya, kekacauan, kekosongan kerja.

### 3. Prinsip-prinsip Koordinasi

Koordinasi yang dilaksanakan pada aparat kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang dan instansi terkait lainnya secara benar sehingga menunjang terhadap proses pencapaian tujuan, maka setiap unsur yang melaksanakan koordinasi harus memahami dan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi. Mengenai prinsip-prinsip koordinasi ini dikemukakan oleh Suganda (1988:47) antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kesempatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama;
- b. Adanya kegiatan kesempatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak, termasuk jadwal dan targetnya;
- c. Adanya ketaatan dan loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian yang telah ditetapkan;
- d. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing;
- e. Adanya koordinator yang dapat memimpin pemecahan masalah bersama;
- f. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah yang dihadapi;
- g. Adanya saling hormat menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Kemudian Kotter dan Hessket (1992:79) berpendapat bahwa prinsip-prinsip koordinasi tersebut cukup meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip efisiensi;
- b. Prinsip kesatuan arah tujuan;
- c. Prinsip prevalitas, koordinasi memasuki segenap kegiatan manajemen dan pelaksanaan;
- d. Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi;
- e. Prinsip dari koordinasi yang strategis.

*Prinsip efisiensi* dimaksudkan bahwa koordinasi harus berjalan dengan efisien. Koordinasi yang dijalankan harus menghindari pemborosan dana, daya dan sarana.

*Prinsip kesatuan arah dan tujuan* bahwa dalam kegiatan administrasi, koordinasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang yang terlibat didalamnya. Mulai dari pimpinan sampai kepada unit-unit pelaksana sehingga terarah, terintegrasi dan terhindar dari kesimpangsiuran, duplikasi jabatan dan kekosongan jabatan.

*Prinsip prevasivitas* bahwa pengkoordinasian harus dilakukan dan memasuki segenap kegiatan administrasi mulai dari perencanaan, pengkoordinasian, pergerakan dan pengawasan.

*Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi* bahwa dalam kegiatan administrasi yang dimulai dari perencanaan sampai pengawasan harus benar benar dilakukan dengan terperinci dengan menggunakan alat yang tepat sehingga sasaran koordinasi dapat dicapai dengan tepat.

*Prinsip koordinasi yang strategis* bahwa koordinasi harus dijalankan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan. Pengkoordinasian yang dilakukan

harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan situasi termasuk nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Siagian (1992:110) menyatakan bahwa koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesamaan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi merupakan sesuatu proses yang berisi pengaturan agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin. Thoha (1991:220) menyatakan bahwa: "Koordinasi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan".

Semua prinsip koordinasi tersebut penting artinya untuk dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan yang tentunya melibatkan banyak pihak dalam penanganannya. Dengan berkoordinasi yang baik maka aparat kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang dan instansi terkait lainnya maka akan terasa manfaatnya. Kegiatan yang berat akan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif.

Prinsip koordinasi itu dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kedisiplinan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin yang baik akan mendorong gairah kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan pemerintah dan masyarakat. Setiap pimpinan sebaiknya selalu

berusaha agar bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Seorang pimpinan dapat dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika para bawahannya berdisiplin baik

*Kedisiplinan* adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku. *Kesadaran* adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dia akan memenuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik bukan atas paksaan, sedangkan *kesediaan* adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang baik. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, efisien dan efektivitas kerja akan tercipta dengan baik pula. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu wilayah. Tanpa kedisiplinan akan sulit untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban yang baik di dalam kehidupan masyarakat.

#### **4. Pengertian Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Komunikasi yang tidak efektif dapat dikatakan sebagai akar semua permasalahan. Tidak berhasilnya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sering kali disebabkan karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

Istilah *komunikasi* atau dalam bahasa Inggris "*Communication*" berasal dari bahasa Latin "*Communicatus*" yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Berkamunikasi menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan.

Thoah (1991:167) menyatakan bahwa "Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain". Lasswell dalam Uchjana (2009:10) menyatakan bahwa komunikasi itu meliputi 5 unsur, yaitu:

- a. Komunikator (*communicator, source, sender*).
- b. Pesan (*message*).
- c. Media (*channel, media*).
- d. Komunikan (*communicant, communicate, reciever, recipient*).
- e. Efek (*effect, impact, influence*).

Jadi komunikasi dapat dikatakan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dalam hal berkomunikasi, seorang Camat harus dapat berkomunikasi baik kepada atasannya, kepada bawahannya, kepada masyarakatnya dan juga kepada instansi lainnya termasuk polsektif Bukit Intan agar tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil dengan baik.

Uchjana (2009:8) menyatakan bahwa Ada 4 macam tehnik berkomunikasi, yaitu:

- a. Komunikasi Informatif.
- b. Komunikasi Persuasif.
- c. Komunikasi Instruktif/koersif.
- d. Hubungan Manusiawi.

Keempat macam tehnik tersebut hendaknya dapat dikuasai dengan baik oleh seorang Camat agar dia dapat melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Sendjaja (2009:9.3) menyatakan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan berhasil efektif, harus memiliki prinsip dasar yang harus dipenuhi dari sumber. Prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh sumber komunikasi yang efektif itu ada tiga macam:

- a. *Kredibilitas sumber*, sumber dinilai punya pengetahuan, keahlian atau pengalaman yang relevan dengan topik pesan yang disampaikan sehingga pihak penerima menjadi percaya bahwa pesan yang disampaikan bersifat objektif.
- b. *Daya tarik sumber*, salah satu hal yang menentukan upaya penyampaian pesan komunikasi. Apabila sumber dinilai menarik oleh penerima maka upaya yang diinginkan akan lebih cepat berhasil.
- c. *Kekuatan sumber*, dalam hal ini sumber memiliki kekuatan/power seperti kharisma, wibawa otoritas, kompetensi atau keahlian dan pemenuhan atau *compliance*.

Sumber Daya Manusia yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dalam berkomunikasi. Sumberdaya manusia (*man power*) merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang berupa kemampuan daya pikir dan daya fisik. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya fikir dan daya fisik yang dimiliki seseorang individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan

lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh kepuasan. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan latihan). Kecerdasan tolok ukurnya adalah *Intelligence Quotient (IQ)*

Banyak terdapat rumusan pengertian tentang komunikasi, semakin banyak orang menulis semakin beraneka ragam pengertian dan rumusan dari istilah itu. Hal ini merupakan suatu tanda kedinamisan ilmu, namun demikian, hampir semua rumusan pengertian komunikasi yang dipergunakan dalam berbagai literatur menekankan adanya penggunaan simbol-simbol untuk mentransfer pengertian dari suatu informasi. Lebih dari itu yang teramat penting dalam memahami komunikasi adalah terjadinya suatu proses antar orang atau antar pribadi yang melibatkan suatu usaha untuk mengubah perilaku.

Pengertian komunikasi antar orang atau antar pribadi ini sama dengan pengertian komunikasi yang sudah dikenal pada umumnya. Secara formal dapat diartikan sebagai proses untuk penyampaian berita yang dilakukan oleh seseorang dan diterimanya berita tersebut oleh orang lain atau kelompok orang lain dengan suatu akibat dan umpan balik yang segera. Komunikasi semacam ini tidak jauh berbeda dengan bentuk perilaku orang-orang, adakalanya efektif dan adakalanya tidak efektif.

Dimensi komunikasi dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat menurut Uchjana (2009:122) dapat terbagi sebagai berikut:

a. Komunikasi Internal

Komunikasi Internal didefinisikan oleh Brennan dalam Uchjana (2009:129) sebagai:

*Interchange of ideas among the administrators and its particular structure (organization) and interchange of ideas horizontally and vertically within the firm which gets work done (operation and management.” (Pertukaran gagasan diantara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jawatan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan atau jawatan tersebut lengkap dengan strukturnya yang khas (organisasi) dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan atau jawatan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung (operasi dan manajemen).*

Komunikasi internal dapat dibagi dalam dua dimensi yaitu :

1) Komunikasi vertikal, adalah komunikasi dari atas kebawah (*downward communication*) dan dari bawah keatas (*upward communication*) yaitu komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik (*two-way traffic communication*). Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, penjelasan-penjelasan, dan lain-lain kepada bawahannya dan sebaliknya, bawahan memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan-pengaduan dan sebagainya kepada pimpinan.

Komunikasi menyangkut hubungan manusia dengan manusia, maka suksesnya komunikasi ditentukan oleh tingkah laku manusia yang mengadakan komunikasi.

Untuk mengetahui hubungan komunikatif yang bagaimana yang sebaiknya antara pimpinan dan bawahannya kita dapat menelaah

konsep yang dikembangkan oleh profesor Harry Ingham yang disadur oleh Uchjana (2009:124) yang lebih dikenal dengan *Johari window*. Berdasarkan konsep tersebut, tingkah laku manusia dapat digambarkan secara skematis seperti di bawah ini:

<b>I</b> <b>OPEN AREA</b> Known by ourselves or known by others	<b>II</b> <b>BLIND AREA</b> Known by others not known by ourselves
<b>III</b> <b>HIDDEN AREA</b> Known by ourselves but not known by others	<b>IV</b> <b>UNKNOWN AREA</b> Not known by ourselves and not known by others

Gambar 2.2 : Skema *Johari Window*

Area I, yakni *Open Area* atau Bidang Terbuka menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang disadari sepenuhnya oleh yang bersangkutan, juga orang lain. Ini berarti adanya keterbukaan dan tidak ada yang disembunyikan kepada orang lain.

Area II, yakni *Blind Area* atau Bidang Buta menggambarkan bahwa perbuatan seseorang diketahui oleh orang lain, tetapi dia sendiri tidak menyadari apa yang dilakukannya.

Area III, yakni *Hidden Area* atau Bidang Tersembunyi adalah kebalikan dari Area II, bahwa yang dilakukan oleh seseorang disadari sepenuhnya oleh yang bersangkutan, tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Ini berarti bahwa orang ini bersifat tertutup. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak perlu diketahui oleh orang lain.

Yang terakhir adalah area IV, *Unknown Area*, bidang tak dikenal yang menggambarkan bahwa tingkah laku seseorang tidak disadari oleh dirinya sendiri dan tidak diketahui oleh orang lain

- 2) Komunikasi horizontal, adalah komunikasi yang mendatar antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan sesama karyawan dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, maka komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu dengan lain bukan pada waktu mereka sedang bekerja, melainkan waktu istirahat, sedang rekreasi atau waktu pulang kerja. Dalam situasi ini sering kali mengenai hal-hal yang menyangkut pekerjaan atau tindakan pimpinan yang merugikan mereka.

Pemecahan masalah yang timbul dalam proses ini adalah tugas dari *public relations officer* (Kepala Hubungan Masyarakat). Tugas pekerjaan Kepala Humas sebenarnya tidak hanya keluar (*external*), tetapi juga ke dalam (*internal*) yang dikenal dengan istilah *internal public relations*, yang menyangkut *employee relations* yaitu hubungan dengan karyawan .

Antara komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal, terkadang terjadi apa yang disebut komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal atau disebut komunikasi silang (*cross communication*) adalah komunikasi antara pimpinan seksi dengan pegawai seksi lain. Sebagai contoh, seorang sopir yang termasuk seksi angkutan berkomunikasi dengan kepala bagian personil, yang secara struktural

tidak termasuk seksi angkutan tersebut. Andaikata komunikasi itu tidak formal, maka tidak akan menimbulkan masalah, namun seringkali berupa keluhan bawahan tentang nasibnya yang kurang baik yang diterimanya dari atasannya.

b. Komunikasi Eksternal

Adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi ini sering dilakukan oleh Kepala Humas yang merupakan tangan kanan pimpinan. Kegiatan ini dilakukan karena banyaknya tugas yang diemban pimpinan. Humas adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Tujuannya adalah menghasilkan integrasi yang kokoh, mendorong kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Pemimpin dalam menciptakan hubungan antarmanusia yang harmonis memerlukan kecakapan dan keterampilan tentang komunikasi, psikologi, sosiologi dan etimologi sehingga dia memahami serta dapat mengatasi masalah dalam hubungan dengan masyarakat.

Pimpinan hendaknya terbuka serta dapat mendorong partisipasi dan keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau keluhan-keluhannya. Keadaan ini dapat tercipta dengan memanfaatkan komunikasi dua arah, formal dan informal, maupun vertikal dan horizontal, sehingga terdapat saling pengertian dan penghayatan mengenai kebijakan yang diambil. Dengan kebijakan tersebut masyarakat akan merasa mendapat pengakuan dan perlakuan yang baik

sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Komunikasi ini terdiri dari dua jalur yang dilaksanakan secara timbal-balik yaitu:

- 1) Komunikasi dari organisasi kepada khalayak, umumnya bersifat informatif yang dapat berupa majalah, pidato radio, pidato televisi, artikel surat kabar atau majalah, film dokumenter, brosur, poster dan lain sebagainya.
- 2) Komunikasi dari khalayak ke organisasi yang merupakan umpan balik dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Komunikasi ini sering kita sebut sebagai opini publik dan ini sering kali merugikan organisasi. Untuk itulah harus diusahakan agar segera dapat diatasi dalam arti kata tidak menimbulkan permasalahan.

## 5. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar "efektif" yang diambil dari bahasa Inggris "effective" yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Robbins (1989:129) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.

Pengetian efektivitas menurut Hidayat (1986) adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Menurut Saksono (1984) efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan *out put* yang dicapai dengan *out put* yang diharapkan

dari jumlah in put. Hasil perbandingan itulah yang dapat dikatakan efektif atau tidaknya suatu kegiatan.

Satria mengungkapkan pendapat Ungson dan Mowday (2012):

Keefektifan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi untuk mendapatkan dan dengan efisien menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia untuk memenuhi setiap target keinginan diraih dan kata efektivitas merupakan hakim yang terbaik dalam melawan apapun sasaran-sasaran sebuah organisasi.

Dalam rumusan ensiklopedi administrasi menurut The Liang Gie (1977 : 109) :

Kata efektivitas berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dari perbuatan itu telah dicapai bahkan secara maksimal (mutu atau jumlah); sebaliknya dilihat dari segi usaha efek yang diharapkan juga telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan lima unsur usaha secara maksimal. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang, ruang atau benda.

Di dalam organisasi, efektivitas merupakan bahasa yang senantiasa hangat, yang diangkat berdasarkan isu seperti restrukturisasi sumber daya yang tersedia, perubahan teknologi, pemodifikasian iklim dan budaya organisasi serta pengembangan strategi performa pegawai berbasis target, sementara itu bahasan efisiensi meliputi evaluasi atas segala sumber daya yang dioperasikan yaitu aspek *man, material, machine, methods* dan *money*. Seluruh sumber daya tersebut tersedia dalam jumlah terbatas sehingga pendayagunaannya perlu secara optimal dan sependek mungkin.

Efektivitas dalam organisasi benar-benar mempunyai kaitan yang amat krusial dengan efisiensi. Segala bentuk organisasi perlu secara cermat dan terampil mempelajari kondisi lingkungan tempatnya bekerja, maka program-program, kebijakan dan strategi pengembangan sangatlah tergantung pada kondisi ekonomi, teknologi dan lingkungan serta psikologis. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja.

Bicara tentang efektivitas, rasanya kita perlu mencuplik dari salah satu buku manajemen terlaris sepanjang masa "*In search of Excellent*", oleh Peters dan Waterman. Mereka menemukan delapan karakteristik yang harus dimiliki oleh seluruh organisasi sebagai berikut:

- a. Memiliki orientasi tindakan dan perampungan urusan yang kuat.
- b. Dekat dengan pihak yang dilayani dan memahami kebutuhan mereka.
- c. Memberikan keleluasaan yang tinggi pada pegawai dan mengasah semangat *entrepreneurship* mereka.
- d. Berupaya meningkatkan produktivitas melalui partisipasi pegawai.
- e. Para pegawai mengetahui apa yang menjadi pijakan organisasi dan pimpinan secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah.
- f. Adanya rasa sifat melayani terhadap yang mereka telah tahu dan pahami.
- g. Memiliki struktur yang simpel dan elegan dengan jumlah orang *staff support activities* yang minimal.
- h. Membangun dan meramu kendali yang ketat dan tersentralisir untuk melindungi nilai inti organisasi.

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisiensi meskipun ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas

menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Tiga pola yang harus diperhatikan dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat agar tujuan tercapai dengan baik adalah sebagai berikut:

- a. *Optimasi tujuan*, yaitu kita melihat bagaimana pencapaian target kerja yang dilaksanakan. Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan ataukah tidak. Kita juga melihat apakah ada keluhan yang datang dari masyarakat.
- b. *Sistematika*, yaitu melihat kemampuan pimpinan dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Apakah memiliki kemampuan dan keahlian dalam tugas pekerjaannya.
- c. *Perilaku dalam organisasi*, yaitu bagaimana tingkat ketelitiannya dalam melaksanakan tugas serta berapa besar tingkat kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan juga konsentrasi dalam tugas pekerjaannya.

Efektivitas merupakan wujud dari kemampuan untuk mendayagunakan sesuatu secara tepat sesuai dengan standar yang jelas dan dapat diterima secara universal. Konteks ini menyatakan bahwa efektivitas menunjukkan taraf mencapai tujuannya secara ideal, taraf efektivitasnya dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti.

Siagian mengemukakan bahwa efektivitas adalah “pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya”. Kata efektivitas menunjukkan bahwa:

- a. Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kegiatan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif. Secara teknis efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan.
- b. Diakui bahwa terdapat tiga dimensi yang kritis dan dapat dipertimbangkan dalam mengamati tingkat efektivitas suatu organisasi atau kelompok yaitu:
  - 1) Keluaran yang dihasilkan;
  - 2) Kepuasan para anggota.
  - 3) Pertumbuhan dan pengembangan staf.
- c. Efektivitas pada umumnya dibicarakan dalam konteks aktivitas manajemen dan kelompok atau organisasi. Efektivitas selalu mengacu kepada tujuan organisasi dan sekaligus kepada kelangsungan hidup

organisasi. Oleh karena itu efektivitas harus diukur dengan produk dari suatu organisasi yang mencakup jumlah dan mutunya, diukur dengan aspek kemanusiaan baik yang menjadi unsur penggerak maupun unsur konstituen organisasi, efektivitas juga dapat diukur dengan bagaimana anggota suatu organisasi dikembangkan kemampuannya dalam melakukan tugas-tugas organisasi.

Banyak pendekatan organisasi yang dapat kita pelajari dalam kehidupan bermasyarakat (Sutarto, 1997:250). Pendekatan itu adalah sebagai berikut:

- 1) *Pendekatan Klasik*, disebut juga pendekatan tradisional, pendekatan proses, pendekatan birokrasi dan pendekatan rancangan struktural.
- 2) *Pendekatan Pengalaman*, keberhasilan suatu organisasi ditentukan apabila para pejabat yang menanganinya telah mempelajari pola pengalaman dari pejabat terdahulu yang telah mencapai kesuksesan. Pembinaan sesuatu harus diperoleh melalui praktek. Seringkali kita dengar ungkapan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik.
- 3) *Pendekatan Hubungan Kerja Kemanusiaan*, sering disebut pendekatan perilaku, pendekatan neoklasik. Pendekatan ini bertolak dari pendirian organisasi yang beranggotakan orang-orang pasti akan melibatkan hubungan antar mereka.
- 4) *Pendekatan Pembuatan Keputusan*, berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung dari akibat berbagai keputusan yang dibuat oleh pimpinan.

- 5) *Pendekatan Matematika*, dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa berbagai asas organisasi, berbagai fungsi manajemen merupakan pola-pola rasional dan logis. Segala problem yang timbul dalam organisasi dapat dipecahkan secara matematis dan pendekatan ini sering disebut pendekatan kuantitatif.
- 6) *Pendekatan Spontanitas*, bahwa aktivitas dalam organisasi akan berhasil mencapai tujuan apabila timbul secara spontanitas. Pendekatan formal, keputusan resmi, prosedur yang mendetail hendaknya dikurangi dan lebih banyak bersifat informal.
- 7) *Pendekatan Partisipasi*, melalui rapat suatu keputusan diambil. Sehingga setiap anggota merasa bertanggung jawab atas apa yang telah diputuskan dan mereka yakin bahwa pendapat kelompok akan lebih baik dari pada pendapat satu orang.
- 8) *Pendekatan Tantangan dan Hambatan*, manusia sering jemu dengan pekerjaannya sendiri, maka dari itu diperlukan adanya tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Pendekatan ini lebih mengutamakan hasil dari pada prosedur yang mendetail.
- 9) *Pendekatan Pengarahan*, bahwa agar tujuan organisasi dapat dicapai maka pejabat yang lebih tahu sebaiknya memberitahu kepada yang belum mengetahuinya ataupun yang ingin mengetahuinya.
- 10) *Pendekatan Kontrol dan Keseimbangan*, yang mementingkan adanya pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas dan apabila terjadi kesalahan segera diperbaiki, tidak berlarut-larut.

- 11) *Pendekatan Paternalistik*, mereka berpendapat bahwa pimpinan harus lebih pandai dari bawahan. Pimpinan harus membimbing, memberi petunjuk dan perintah, sedangkan bawahan adalah pelaksana keputusan yang diambil pimpinan.
- 12) *Pendekatan Kebebasan*, bahwa organisasi akan berhasil mencapai tujuan apabila adanya kebebasan dalam bekerja dan melaksanakannya sesuai dengan keinginan yang terpenting tujuan akan tercapai.
- 13) *Pendekatan otokratis*, bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan apabila semuanya telah diputuskan oleh pimpinan.
- 14) *Pendekatan Demokratis*, bahwa aktivitas organisasi akan berjalan dengan baik apabila masalah yang timbul akan diputuskan bersama antara pimpinan dan bawahan.
- 15) *Pendekatan Pribadi*, bahwa hubungan antar pribadi secara langsung akan menciptakan suasana yang baik dan akan mudah mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 16) *Pendekatan Tanpribadi*, pendekatan tidak langsung dan hubungan sering dilaksanakan secara tertulis.
- 17) *Pendekatan Biologi*, bahwa organisasi memiliki sifat-sifat umum yang sama dengan organisme hidup. Lahir, tumbuh berkembang, mencapai puncak, mundur dan mati. Sakit pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain.

- 18) *Pendekatan Profesi*, bahwa organisasi tidak hanya ditandai oleh tujuan yang mereka harus capai, tetapi juga oleh perimbangan yang tinggi dari keahlian para pejabat dan juga ditandai dengan hubungan wewenang antara keahlian dan bukan keahlian.
- 19) *Pendekatan Sistem*, yaitu pendekatan dengan kebulatan dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi yang terikat oleh asas-asas tertentu
- d. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kegiatan biasanya dilakukan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimiliki telah dikelola secara optimal dan objektif.

Efektivitas tidak boleh lepas dari faktor tujuan, faktor manusia, faktor nilai dan faktor sistem organisasi itu sendiri yang dihubungkan dengan kondisi waktu, target, jumlah dan kualitas. Dengan keterangan itu ternyata efektivitas bersifat multidimensional sehingga strategi yang dipilih untuk meningkatkan efektivitas tergantung pada kekhususan atau spesifikasi faktor dari permasalahan yang hendak dipecahkan. Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya sesuatu yang efisien belum tentu efektif.

## **6. Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang**

Efektivitas kerja suatu organisasi termasuk dalam efektivitas tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota

Pangkalpinang dilihat dari berbagai unsur. Kriteria efektivitas organisasi menurut Donnelly et al, (1984:129) terdiri dari lima unsur, yaitu:

- a. Produksi;
- b. Efisiensi;
- c. Kepuasan;
- d. Keadaptasian; dan
- e. Kelangsungan hidup.

*Produksi* sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.

*Efisiensi* sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langkah oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan.

*Kepuasan* sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

*Keadaptasian* sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggap atau tidaknya organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk dan lain sebagainya, sedangkan perubahan internal seperti ketidakefisienan, dan ketidakpuasan.

*Kelangsungan hidup* sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Efektif atau tidaknya penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Pemerintah kota Pangkalpinang dapat dilihat dari berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut bermacam-macam dan beraneka-ragam bentuknya. Sedarmayanti (2001:52) membagi faktor-faktor tersebut kedalam tiga macam faktor yaitu faktor organisasi, faktor individu dan faktor sosial dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1 Beberapa Faktor untuk mengetahui Tingkat Kinerja (Pegawai yang tidak Efektif)**

Faktor Organisasi	Faktor Individu	Faktor Sosial
<b>A. Selama Bekerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlambatan</li> <li>- Kehadiran</li> <li>- Pelatihan</li> <li>- Penurunan Produktivitas</li> <li>- Perombakan Rencana/Jadwal</li> <li>- Peningkatan tanggungjawab kepengawasan</li> <li>- Kekeliruan</li> <li>- Dan ketidakefisienan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengaruh karier</li> <li>-Pengaruh kemampuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakpuasan klien Hubungan masyarakat</li> <li>- Kredibilitas &amp; abilitas sistem untuk memberikan pelayanan efektif</li> </ul>
<b>B. Diluar Pekerjaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehilangan investasi</li> <li>- Semangat</li> <li>- Rekrutmen</li> <li>- Seleksi dan penempatan</li> <li>- Kekurangan biaya</li> <li>- Perombakan rencana/jadwal</li> <li>- Kompensasi sebenarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengaruh sosial</li> <li>-Pengaruh keluarga</li> <li>-Pengaruh psikologis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kekurangan dalam hal kualitas pelayanan pedidikan</li> <li>- Hasil gagal diperoleh sesuai dengan standar</li> </ul>

Pengertian-pengertian koordinasi dan komunikasi sebagaimana dikemukakan di atas pada dasarnya lebih berhubungan dengan masalah koordinasi dan komunikasi antar orang atau bagian dalam suatu organisasi. Secara spesifik, terdapat beberapa indikator daya dukung peralatan terhadap efektivitas kerja mencakup, yaitu: cukup dalam jumlah, efisien, efektif dan praktis dalam penggunaannya. Sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, koordinasi tersebut berkaitan dengan penyesuaian usaha dengan tujuan dan salah satu tujuan itu adalah efektivitas kerja, sedangkan komunikasi menitik beratkan pada kebersamaan dalam mencapai tujuan. Dalam berkomunikasi kita tentunya ada komunikator dan komunikan yang saling berhubungan dengan menggunakan alat dan saluran sesuai dengan kebutuhan guna mencapai tujuan bersama.

Beberapa pengertian dari konsep efektivitas kerja yang perlu dikemukakan oleh peneliti berikut ini. Dalam *Ensiklopedia Administrasi*, disebutkan: Efektivitas pekerjaan manusia termasuk efektivitas tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan.

Siagian (1992:151) menyebutkan: "Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan. Pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak tergantung bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu".

Kesimpulan dari berbagai batasan yang dikemukakan di atas, tampaklah bahwa efektivitas kerja berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan, kualitas pekerjaan dan waktu pengerjaan. Efektivitas kerja tidak berkaitan dengan cara dan biaya pekerjaan, karena yang terakhir berkaitan dengan konsep efisiensi kerja. Sejalan dengan berbagai pendapat mengenai efektivitas kerja di atas, maka dapat ditarik beberapa indikator yang dapat dijadikan alat untuk mengukur efektivitas kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh McGill (dalam Sutarto, 1997:209), indikator-indikator dari efektivitas kerja meliputi:

- a. Pekerjaan yang memuaskan;
- b. Adanya cukup kerjasama antar kelompok kerja;
- c. Banyaknya peluang bagi pegawai tersebut untuk bekerja dengan baik;
- d. Adanya kontinuitas kerja selama pegawai tersebut bekerja dengan baik;
- e. Keinginan untuk mencari pekerjaan lain;
- f. Masalah sikap pilih kasih;
- g. Pekerjaan yang memanfaatkan kemampuan dengan baik;
- h. Tempat kerja yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya; dan
- i. Tunjangan yang lebih baik.

Robbins mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan empat model pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan pencapai tujuan (*goal attainment*).
- b. Pendekatan sistem yang menekankan stabilitas.
- c. Pendekatan konstituensi strategis yang menekankan terpenuhinya tuntutan *stakeholder*.
- d. Pendekatan nilai-nilai bersaing yang mempertemukan tiga kriteria seperti *human relation model*, *open system model* dan *relational good model*.

Rangkuman yang dapat diambil berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang dapat

dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja serta berhubungan satu sama lain secara fungsional dalam mencapai tujuan bersama. Gangguan pada salah satu komponen dapat mengakibatkan gangguan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang secara keseluruhan. Demikian pula dengan jumlah, kualitas dan distribusi keahlian perangkat masing-masing satuan kerja di lingkungan kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang masih belum memadai. Kualitas yang belum memadai ini berimbas pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman pegawai mengenai tugas dan fungsi mereka dalam pelaksanaan kebijakan baru.

Berbagai tumpang tindih dan keterlambatan kerja akibat rendahnya pengetahuan dan pemahaman pegawai dapat diatasi dengan berbagai metode dan cara yang dapat dipelajari secara ilmiah. Koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja mendapatkan penanganan yang lebih serius. Masalah yang sama terjadi berkenaan dengan keterbatasan jumlah pembiayaan serta perlengkapan. Untuk mempertahankan efektivitas kerja sesuai dengan tuntutan kebijakan kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang, koordinasi dan komunikasi dalam pengadaan dan alokasi pembiayaan serta perlengkapan membutuhkan perhatian yang besar pula.

## **B. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir ini dibuat oleh peneliti berpedoman kepada beberapa pendapat dari para ahli yang terkait dengan konsep-konsep koordinasi dan

komunikasi dalam pemerintahan dan pembangunan merupakan suatu fungsi manajemen atau tugas pimpinan organisasi yang menentukan pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut dapat disimak pendapat dari Syafrudin (1976:67) yang mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa masalah koordinasi adalah salah satu masalah pemerintah yang terpenting, yang terlebih setelah perang dunia pertama semakin bertambah sukar tetapi pula semakin besar artinya, demikian tulis Van Poelje masalah koordinasi pemerintah adalah masalah tentang kerja sama antara aparatur pemerintah dan pertaliannya satu sama lain.

Webster's New Collegiate Dictionary dalam Sendjaja (2009:1.10) menyatakan bahwa Komunikasi adalah "suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku".

Menciptakan suatu kondisi yang baik dalam kesatuan tindakan diperlukan koordinasi dan komunikasi yang mempunyai landasan untuk berpijak dalam setiap usaha dan tindakannya, sehingga koordinasi dan komunikasi yang melibatkan berbagai pihak antara Camat dengan aparat instansi vertikal dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebagai landasan pertama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 27 bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Camat adalah:

1. Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
2. Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
3. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabuapten/kota dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan

Pasal 28 disebutkan sebagai berikut:

1. Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
2. Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
3. Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Kenyataan yang dapat dilihat dari konsep koordinasi, maka koordinasi pada aparat kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang mempunyai pengertian sebagai salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus antara lain harus adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan serta arah yang sama. Pentingnya koordinasi ini agar organisasi dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi. Untuk melaksanakan koordinasi maka pihak-pihak yang terkait dalam suatu pekerjaan atau kegiatan tidak hanya cukup memahami pengertian koordinasi semata, tetapi untuk implementasinya harus lebih memahami teknik-teknik koordinasi.

Teknik-teknik koordinasi, sebagaimana diuraikan oleh Handayani (1994:19) terdiri dari:

1. Koordinasi melalui kewenangan;
2. Koordinasi melalui konsensus;
3. Koordinasi melalui pedoman kerja;
4. Koordinasi melalui konferensi..

Komunikasi yang efektif tentunya sangat bergantung dari sumbernya.

Karakteristik sumber yang perlu diperhatikan menurut Sendjaja (2009:3) ada tiga, yaitu:

1. Kridibilitas sumber.
2. Daya tarik sumber.
3. Kekuatan sumber.

Berdasarkan pendapat diatas, maka nampak jelas gerak langkah aparaturn pemerintahan dan penyelenggaraan harus dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna koordinasi dan komunikasi kegiatan sehingga dapat dicapai tujuan yang diharapkan, kerjasama yang saling mendukung dari instansi-instansi terkait dalam suatu pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan akan memperlancar usaha yang dilakukan. Dalam hal ini, Camat dengan instansi terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban dimana usaha tersebut harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan.

Koordinasi dan komunikasi mendapat dukungan dari instansi-instansi terkait dalam pelaksanaannya, maka koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Camat harus didasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi dan komunikasi yang efektif. Koordinasi dan komunikasi yang efektif tentunya dapat mempermudah tercapainya tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya mengenai pengertian Camat, peneliti mengambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pengertian Ketentraman dan Ketertiban itu sendiri menurut buku Poerwadarminta adalah:

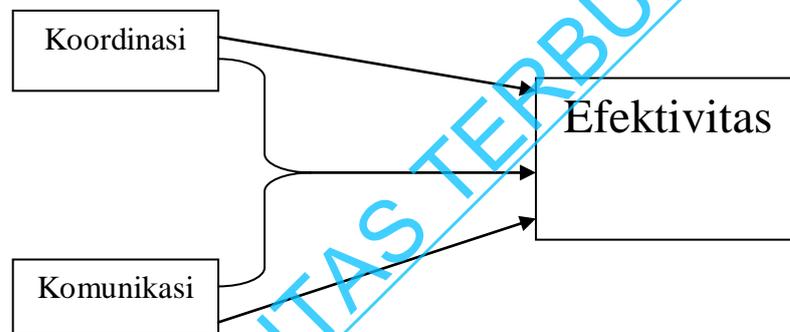
Tentram adalah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang tidak gelisah, tenang hati dan pikiran. Sedangkan tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban adalah aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan.

Budiardjo (1989:34) menyatakan bahwa pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Kelompok tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lain

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa batasan konsep sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah proses penyatuan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Agar pelaksanaan koordinasi dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka harus memenuhi atau sesuai dengan prinsip-prinsip koordinasi, yaitu:
  - a. Koordinasi melalui kewenangan;
  - b. Koordinasi melalui konsensus;
  - c. Koordinasi melalui pedoman kerja;
  - d. Koordinasi melalui konferensi.
3. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku.
4. Agar komunikasi menjadi efektif, maka sumbernya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu:
  - a. Kredibilitas sumber.

- b. Daya tarik sumber.
  - c. Kekuatan sumber.
5. Camat adalah kepala wilayah yang merupakan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan membina kehidupan masyarakat terutama menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Sedangkan seorang Camat mempunyai tugas pokok di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk memperjelas alur pikir dalam penelitian ini, dapat dilihat pada bagan berikut ini:



**Gambar 2.3 Model Hubungan Antara Koordinasi dan Komunikasi Dengan Efektivitas Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun tesis ini adalah diskriptif analisis, yaitu dengan cara menjelaskan secara lengkap tentang gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang sedang berlangsung pada waktu dan tempat tertentu, kemudian membandingkan serta menghubungkan baik dengan teori maupun praktek yang berkaitan sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari masalah yang dibahas (Nazir, 1983:21).

Desain diskriptif analisis ini memungkinkan peneliti untuk memilih satu atau beberapa objek penelitian untuk dikaji secara mendalam tentang esensi dari objek penelitiannya.

#### **B. Perumusan Hipotesis**

Hipotesis adalah pertanyaan yang diterima secara sementara dengan suatu kebenaran sebagaimana mestinya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja dalam verifikasi. Berdasarkan permasalahan, hipotesa dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis Minor :

1. Terdapat pengaruh positif koordinasi camat dengan efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang.

2. Terdapat pengaruh positif komunikasi Camat dengan efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang.

Hipotesis Mayor :

Terdapat pengaruh positif koordinasi dan komunikasi Camat dengan efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian (Arikunto, 1993:116). Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi unit analisisnya adalah seluruh aparat yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan komunikasi pada unit yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban, yang berjumlah, **8.659 orang**.

Populasi menurut Singarimbun (1989:155) adalah: "Jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga". Populasi sasaran dalam penelitian ini yakni keseluruhan unit yang terkait dengan penelitian dan penulisan tesis tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang.

Unsur-unsur populasi terdiri dari:

- |                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| a. Aparat kecamatan | : | 25 orang. |
| b. Aparat Polsek    | : | 36 orang. |

c. Perangkat kelurahan	:	41 orang.
d. Pengurus Rukun Warga/RW	:	90 orang.
e. Pengurus Rukun Tetangga/RT	:	305 orang.
f. Pengurus Karang Taruna	:	84 orang.
g. PKK Kecamatan	:	17 orang
h. PKK Kelurahan	:	28 orang
i. Kepala Keluarga	:	8.033 orang

**Ukuran Populasi (N) : 8.659 orang.**

## 2. Sampel

Sampel adalah wakil dari populasi. Jika jumlah sampel sama dengan jumlah populasi maka dinamakan sensus. Namun sering kali terjadi sampel yang diambil jauh lebih sedikit dari jumlah populasi, asalkan tehnik dan caranya yang tepat tentunya akan menghasilkan penelitian yang baik dan benar.

Secara umum metode yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiono, 2002:73) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N e^2 + 1}$$

Pengertiannya adalah sebagai berikut:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir

Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran 10 %, maka dengan menggunakan rumus di atas diperoleh sampel sebesar:

$$n = \frac{8.659}{8.659 (0,1)^2 + 1}$$

$$= 98,85$$

$$= \mathbf{99 \text{ orang}}$$

Dari jumlah sampel yang diperoleh tersebut selanjutnya, kita gunakan tehnik *purposive sampling* menentukan sampelnya yang menurut Handari (1990:157), adalah sebagai berikut:

Dalam Tehnik *purposive sampling*, pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan, perbedaan terletak pada pembatas sampel dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Aparat Kecamatan

- Camat : 1 orang
- Sekretaris Kecamatan : 1 orang
- Sie Trantib : 1 orang
- Sie Pemerintahan : 1 orang

b. Aparat Polsek

- Kapolsek : 1 orang
- Sie unit Binmas : 2 orang

c. Perangkat Kelurahan : 14 orang

d. Pengurus Rukun Warga/RW : 21 orang

e. Pengurus Rukun Tetangga/RT	:	21 orang
f. Pengurus Karang Taruna	:	7 orang
g. PKK Kecamatan	:	1 orang
h. PKK Kelurahan	:	7 orang
i. Kepala Keluarga	:	21 orang
<b>Ukuran sampel (n)</b>	:	<b>99 orang</b>

#### D. Instrumen Penelitian

Prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian disebut instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena-fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena disebut variabel.

Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Dalam hal ini ada 3 instrumen yang perlu dibuat yaitu:

1. Instrumen untuk mengukur koordinasi;
2. Instrumen untuk mengukur komunikasi;
3. Instrumen untuk mengukur efektivitas.

Instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang pendekatan, sulit ditemukan instrument yang sudah baku.

Untuk itu maka peneliti mencoba membuat instrumen sendiri termasuk menguji validitas dan reliabilitasnya.

Titik tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikatornya. Dari indikator kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Variabel Operasional Penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator
<b>KOORDINASI</b>	Koordinasi melalui kewenangan	1. Terdapat kewenangan dalam koordinasi antara Camat Bukit Intan dengan mitra kerjanya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
	Koordinasi melalui consensus	2. Terdapat kesepakatan kerja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan.
	Koordinasi melalui pedoman kerja	3. Terdapat pedoman kerja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang jelas di kecamatan Bukit Intan.
	Koordinasi melalui konferensi	4. Terdapat pertemuan rutin bulanan di kecamatan Bukit Intan.
<b>KOMUNIKASI</b>	Kridibilitas Sumber	5. Adanya kemampuan Camat untuk membahas dan menanggulangi masalah kamtibmas.

	Daya Tarik Sumber	6. Adanya daya tarik Camat sehingga masalah yang dibahas menjadi interes masyarakat.
	Kekuatan Sumber	7. Adanya kekuatan dan otoritas Camat untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam bidang kamtibmas.
<b>EFEKTIVITAS</b>	Produksi	8. Adanya suatu manfaat dari penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan.
	Efisiensi	9. Adanya fasilitas dan modal dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan.
	Kepuasan	10. Sikap aparat terhadap pelayanan penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan.
	Keadaptasian	11. Adanya keinginan/partisipasi dari masyarakat terhadap pelayanan penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan.
	Kelangsungan hidup	12. Adanya kemajuan dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan merupakan tugas pembangunan organisasi.

## E. Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Sumber data primer*, yaitu data yang diperoleh dari aparat pemerintah kecamatan dan polsek atau merupakan sumber utama dalam penelitian (studi lapangan).
2. *Sumber data sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen, aturan perundang-undangan dan hasil penelitian perorangan yang relevan dengan objek penelitian atau merupakan sumber penunjang dalam penelitian (studi pustaka)

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. *Observasi*, yaitu peneliti mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai masalah, hambatan serta upaya yang dilakukan.
2. *Kuesioner* adalah Untuk mengetahui berapa besar nilai suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya dan berapa besar hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaannya.
3. *Wawancara*, dengan cara ini peneliti memperoleh suatu gambaran dan informasi yang lebih jelas, hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan Camat, aparat kecamatan, Kapolsek, anggota polsek dan masyarakat yang menurut peneliti dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan peneliti.

## F. Metode Analisis Data

Peneliti akan melakukan pengumpulan data sebelum mengadakan analisis data. Data yang terkumpul tersebut merupakan data yang ordinal. Selanjutnya data yang ordinal itu akan dianalisa yakni ingin mengetahui pengaruh koordinasi dan komunikasi aparat kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang dan instansi terkait lainnya terhadap efektivitas tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang. Apakah hal itu mempengaruhi ataukah tidak akan diteliti secara detail menggunakan analisa data. Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan Program *Statistical Products and Solution Services (SPSS) V.17.0 for Windows*.

Teknik analisis data yang akan diterapkan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

*Pertama*, menyusun pertanyaan dalam kuesioner yang telah disebarakan kepada 99 responden. Pertanyaan tersebut disusun menggunakan skor skala likert dari skor 1 sampai 5. Pertanyaan tersebut dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk melihat apakah pertanyaan kuesioner valid dan reliabel untuk dilakukan pengujian tahap berikutnya. Valid dan reliabel atau tidaknya pertanyaan tersebut akan menentukan tahap selanjutnya.

*Kedua*, dilakukan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan masing-masing variabel dalam penelitian. Variabel koordinasi, variabel komunikasi dan variabel efektivitas akan di lakukan analisa deskriptif secara mendalam.

*Ketiga*, pengujian hipotesis yang telah dirumuskan menggunakan analisa korelasi dan regresi berganda.

## G. Uji Instrumen Penelitian

### 1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauhmana suatu kuesioner atau alat ukur mengukur apa saja yang ingin diukur (Singarimbun & Effendi, 1995). Uji ini berfungsi untuk menentukan seberapa cermat suatu alat ukur melakukan fungsi ukuran. Koefisien yang signifikan mencerminkan *good item*, sedangkan insignifikan menunjukkan *poor item*. *Good item* akan ditunjukkan dengan koefisien 0,30 ke atas, sehingga akan dilakukan pengujian pertanyaan untuk menunjukkan pertanyaan tersebut valid atau tidak.

Uji validitas menggunakan korelasi pearson yang mempunyai *coefficient correlation* untuk setiap indikator lebih besar dari 0,3 ( $>0,30$ ).

### 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan ( Singarimbun & Effendi, 1995). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu. Reliabilitas instrumen dicari dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*.

## H. Deskriptif Data

Deskriptif data digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif berfungsi untuk mengetahui

karakteristik sampel yang digunakan secara lebih terperinci dan menjabarkan jawaban responden dalam *nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi* dari masing-masing jawaban.

## I. Analisa Regresi Berganda

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji atau mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Jika data ternyata tidak berdistribusi normal, maka *analisis nonparametric* dapat digunakan. Jika data berdistribusi normal, maka analisis nonparametric termasuk model-model regresi dapat digunakan. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Model regresi memenuhi asumsi normalitas. ( Husein, 2008: 77).

Dalam uji Normalitas ini menggunakan normal *Q-Q plots of regression*.

Dengan dasar dalam pengambilan keputusan ini adalah:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh di sekitar garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola

distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana satu atau lebih variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya atau dengan kata lain suatu variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel bebas. (Ghozali:2005).

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat nilai varians antar nilai Y, apakah sama atau heterogen. Untuk pengujian tersebut digunakan *Partial Regression Plot* dengan diagram antara *residual* dengan *predicted value*.

2. Uji Regresi

Analisa ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat yaitu antara koordinasi (X1) dan komunikasi (X2) terhadap efektivitas (Y). Selain itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2 x_2$$

Keterangan:

Y = Efektivitas

x1 = Koordinasi

x2 = Komunikasi

a = bilangan konstanta

b1 = koefisien regresi koordinasi

b2 = koefisien regresi komunikasi

Untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat juga dilakukan uji statistik, antara lain:

a. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas (koordinasi dan komunikasi) terhadap variabel terikat (efektivitas).

b. Uji F

Untuk mencari ada tidaknya pengaruh variabel bebas (koordinasi dan komunikasi) terhadap variabel terikat (efektivitas) secara bersama-sama dengan menggunakan *F-test*.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan analisa deskriptif serta analisa dan uji statistik terhadap hasil penelitian. Analisa dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner dan berupa data ordinal seperti yang telah dipaparkan dalam metodologi penelitian. Responden yang memiliki karakteristik yang akan dipaparkan sebagai informasi pendukung dalam penelitian ini, diteruskan dengan beberapa tahap analisa yang terdiri dari tiga tahap. *Pertama*, melakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk melihat apakah pertanyaan kuesioner valid dan reliabel untuk dilakukan pengujian tahap berikutnya. *Kedua*, dilakukan analisa diskriptif untuk mendiskripsikan masing-masing variabel dalam penelitian, sehingga akan diperoleh informasi tentang koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Camat terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang. *Ketiga*, pengujian hipotesis yang telah dirumuskan menggunakan analisa korelasi dan regresi berganda. Penelitian ini melakukan analisa data dengan bantuan program *SPSS V.17* untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti.

#### **A. Diskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Batas administrasi**

Kecamatan Bukit Intan merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah kerja Pemerintah kota Pangkalpinang. Sebagai konsekuensi dari Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 tahun 2011 tentang

Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan, maka secara administrasi gambaran perbatasan wilayah kecamatan Bukit Intan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai Batu Rusa dan Laut Cina Selatan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kecamatan Pangkalan Baru kabupaten Bangka Tengah.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kelurahan Ketapang, kelurahan Ampui, kelurahan Rejosari (kecamatan Pangkalbalam), kelurahan Opas Indah, kelurahan Gedung Nasional (kecamatan Taman Sari), kelurahan Pasar Padi, kelurahan Semabung Baru (kecamatan Girimaya).

## 2. Luas wilayah

Luas wilayah kecamatan Bukit Intan yaitu 37,75 km<sup>2</sup>. Wilayah kecamatan Bukit Intan ini sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir berdasarkan Perda No.2 tahun 2011, kecamatan Bukit Intan dibagi menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Bukit Intan dan kecamatan Girimaya. Secara administrasi, kecamatan Bukit Intan mengalami perubahan baik dalam hal luas maupun jumlah kelurahan serta aparatur kelurahan dan kecamatan. Kesemuanya mengalami penyesuaian. Kecamatan Bukit Intan terdiri dari 7 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Kelurahan di wilayah kecamatan Bukit Intan**

No	Nama Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah RW/ RT
1	Air Itam	3,616	3/9
2	Air Mawar	4,506	2/4
3	Bacang	4,14	2/9
4	Pasir Putih	1,885	3/9
5	Semabung Lama	2,083	3/14
6	Sinar Bulan	3,922	3/9
7	Temberan	17,598	2/7

Sumber: Dukcapil kota Pangkalpinang s.d Desember 2011

### 3. Topografi

Kondisi topografi wilayah kecamatan Bukit Intan pada umumnya bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 20-30 m di atas permukaan laut dan kemiringan 0-25 %. Secara morfologi daerahnya berbentuk cekung di mana letak kelurahan Pasir Putih di daerah rendah.

Berdasarkan luas wilayah, kecamatan Bukit Intan dapat dirinci penggunaan tanahnya sebagai berikut:

- a. Lahan kering yang diusahakan untuk pertanian (tanaman makanan, perkebunan rakyat, perikanan dan kehutanan) seluas ± 683 ha.
- b. Lahan yang tidak diusahakan seluas ± 973 ha.
- c. Lahan kering yang dimanfaatkan untuk pemukiman seluas ± 1.377 ha.
- d. Hutan Negara, rawa-rawa dan lain-lain seluas ± 762 ha.

Tanah di kecamatan Bukit Intan mempunyai *ph* rata-rata di bawah 5, dengan jenis tanah *podzolik* merah kuning, *regosol*, *gleisol*, *organosol* yang merupakan pelapukan dari batuan induk, sedangkan pada sebagian kecil daerah rawa, jenis tanahnya *asiosiasi alluvial*.

*hydromorf* dan *glayhumus* serta *regosol* kelabu muda yang berasal dari endapan pasir tanah liat. Keadaan tanah yang demikian kurang cocok untuk tanaman padi, tetapi masih memungkinkan untuk tanaman palawija. Pada daerah pinggiran yaitu kelurahan Air Mawar, kelurahan Temberan dan kelurahan Sinar Bulan cukup potensial untuk menghasilkan lada dan karet.

#### 4. Demografis

Jumlah penduduk di kecamatan Bukit Intan berdasarkan data dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pangkalpinang sampai dengan Desember 2011 sebanyak 32.442 jiwa, dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 16.355 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 16.087 jiwa. Data tersebut diambil berdasarkan laporan rutin pihak kecamatan yang disampaikan kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pangkalpinang. Data ini sering juga digunakan oleh instansi lain apabila mereka memerlukan data tentang kecamatan Bukit Intan. Salah satu instansi yang menggunakan data ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik dalam Pemilu Legislatif, DPD, pemilihan Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kepadatan penduduk di kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan dalam kecamatan Bukit Intan**

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Air Itam	2.085	2.045	4.130
2.	Air Mawar	1.289	1.126	2.415
3.	Bacang	3.791	3.639	7.430
4.	Pasir Putih	2.329	2.208	4.537
5.	Semabung Lama	3.548	3.446	6.994
6.	Sinar Bulan	2.084	1.905	3.989
7.	Temberan	1.229	1.718	2.947
	Jumlah	16.355	16.087	32.442

Sumber: Dukcapil kota Pangkalpinang s.d Desember 2011

5. Eselonisasi organisasi kecamatan berdasarkan PP No.8 tahun 2003
  - a) Camat, eselon III/A
  - b) Sekretaris kecamatan, Eselon III/B
    - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian, eselon IV/B
    - 2) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, eselon IV/B
    - 3) Sub bagian keuangan, eselon IV/B
  - c) Kepala seksi tata pemerintahan, eselon IV/A
  - d) Kepala seksi pembangunan, eselon IV/A
  - e) Kepala seksi pemberdayaan masyarakat, eselon IV/A
  - f) Kepala seksi pelayanan umum, eselon IV/A
  - g) Kepala seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat, eselon IV/A

6. Tugas dan fungsi satuan organisasi kecamatan

Sesuai dengan struktur organisasi kecamatan, maka dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing seksi dan bidang dalam lingkup organisasi kecamatan sebagai berikut:

a) Camat

- 1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi:
  - Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
  - Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
  - Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat kelurahan
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
  - Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- 3) Camat membawahi:
  - a) Sekretaris kecamatan.
  - b) Seksi tata pemerintahan.
  - c) Seksi ketentraman dan ketertiban umum..
  - d) Seksi pembangunan.
  - e) Seksi pelayanan umum.
  - f) Seksi pemberdayaan masyarakat

- b) Sekretaris kecamatan
- 1) Tugas pokok sekretaris kecamatan adalah membantu Camat dalam bidang administrasi atau bidang lain yang diberikan oleh Camat.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    - Menyusun rencana program kecamatan.
    - Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan
    - Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas seksi-seksi.
    - Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kecamatan dengan instansi terkait dalam wilayah kecamatan.
    - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
- 1) Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas sekretaris kecamatan dibidang umum dan kepegawaian.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
    - Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan.
    - Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naska dinas dan pengelolaan dokumentasi kearsipan kecamatan.
    - Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naska dinas.
    - Mengelola, memelihara serta melaporkan barang milik kekayaan daerah lingkup kecamatan.
    - Menyusun administrasi DUK, DP3 dan sumpah/janji pegawai.
    - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d) Kepala sub bagian keuangan
- 1) Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas sekretaris kecamatan di bidang keuangan.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala sub bagian keuangan mempunyai fungsi:
    - Menyusun bahan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.
    - Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, kordinasi pengendalian keuangan dan penyusunan laporan keuangan.
    - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- e) Kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- 1) Kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris kecamatan di bidang evaluasi dan pelaporan.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:
    - Menyusun rencana program administrasi kecamatan.
    - Melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana program serta koordinasi pengendalian rencana dan program serta penyusunan akuntabilitas kinerja kecamatan.
    - Mengkoordinasikan program kegiatan pengelolaan program kerja kecamatan..
- f) Kepala seksi tata pemerintahan
- 1) Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat di bidang pemerintahan kecamatan.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:
    - Mengumpulkan data dan bahan lingkup pemerintahan.
    - Memfasilitasi pelaksanaan pemerintahan yang meliputi pembinaan RT dan RW, pelayanan administrasi pertanahan, pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan, intensifikasi dan ekstensifikasi PBB serta pajak lain di kecamatan.
    - Menyusun bahan koordinasi dengan SKPD lain dan instansi vertikal di tingkat kecamatan untuk dilaporkan kepada Walikota untuk menjadi bahan evaluasi di tahun selanjutnya.
    - Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
- g) Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum
- 1) Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum diwilayahnya.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
    - Mengumpulkan data dan bahan lingkup ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
    - Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi fasilitas pengamanan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta berkoordinasi dengan kepolisian, TNI dan pemuka agama dalam penyelesaian perselisihan antar kelurahan.
    - Melaksanakan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat.

- Melaksanakan upaya pengamanan atas asset-aset pemerintah di wilayah kecamatan.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- h) Kepala seksi pembangunan
- 1) Kepala seksi pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok kepala seksi pembangunan mempunyai fungsi:
    - Mengumpulkan data dan bahan ruang lingkup pembangunan masyarakat di kecamatan.
    - Melaksanakan urusan pembangunan tingkat kecamatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor kecamatan, memfasilitasi LPM serta inventarisasi potensi ekonomi masyarakat di kecamatan
    - Melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan.
    - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- i) Kepala seksi pemberdayaan masyarakat
- 1) Kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat diwilayahnya.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
    - Mengumpulkan data dan bahan lingkup kesejahteraan masyarakat.
    - Memfasilitasi pemberdayaan lembaga sosial masyarakat dan mendorong serta mengembangkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di kecamatan
    - Menyusun profil kecamatan serta pembinaan keagamaan , ketahanan ekonomi keluarga dan ketahanan pangan keluarga dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
    - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- j) Kepala seksi pelayanan umum
- 1) Kepala seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pelayanan umum masyarakat.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok kepala seksi pelayanan umum mempunyai fungsi:
    - Mengumpulkan data dan bahan ruang lingkup pelayanan umum.
    - Pelayanan data dan informasi kecamatan.
    - Pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi.
    - Menyusun bahan koordinasi dengan pihak kelurahan dalam rangka percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya kepada masyarakat.

## B. Karakteristik Responden

Karakteristik dari responden yang didapat oleh peneliti dan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Karakteristik Responden berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang diperoleh oleh peneliti sangat bervariasi. Sebagai suatu kecamatan yang berada di ibukota provinsi, masyarakat di kecamatan Bukit Intan memiliki latar belakang pendidikan yang bermacam-macam tingkatannya dan untuk lebih jelasnya, peneliti dapat memaparkan data tingkat pendidikan masyarakat itu sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SD / Sederajat	0	0
SLTP / Sederajat	4	4,04
SLTA / Sederajat	60	60,61
S1 / Diploma	32	32,32
S2	3	3,03
S3	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 99 responden dengan pendidikan terendah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat sebanyak 4 orang atau 4,04 % dari keseluruhan anggota sampel. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dapat dilihat responden terdaftar sebanyak 60 orang atau 60,61 % dari keseluruhan sampel, kemudian responden dengan tingkat pendidikan S1/Diploma sebanyak 32 orang atau 32,32 %, tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 3,03 %, dan untuk tingkat pendidikan SD/Sederajat atau S3 tidak ada respondennya.

Tingkat pendidikan pada kondisi tertentu dapat mempengaruhi pola dan tindakan seseorang. Sebagaimana dikutip dari *makalah tentang pendidikan/belajar psikologi diambil tanggal 5 Feb 2012*

*Dengan pendidikan akan tercipta masyarakat yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam lingkungan masyarakatnya.*

Data yang ada pada kuesioner bahwa tingkat pendidikan SLTA/Sederajat dan S1/Diploma sangat besar sebanyak 92 orang atau 92,93 % maka diharapkan peranan mereka untuk menjaga dan menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya dengan pandangan yang lebih luas atas pemahaman karakter dan cita-cita yang diinginkan masyarakat. Terlepas dari itu responden dengan tingkat pendidikan S2 tidak bisa kita abaikan karena mereka dapat membawa perubahan dengan pandangan dan analisa yang lebih mendalam, serta dapat membawa inspirasi bagi masyarakat dengan ide yang lebih baik dan aplikatif dengan jumlah sebanyak 3 orang atau 3,03 %. Tentunya perubahan dan perkembangan yang maju dan besar menjadi harapan seluruh warga masyarakat.

Rangkuman data yang diperoleh bahwa pendidikan Camat adalah S1 dengan pangkat/Golongan Pembina/IV.a tentunya telah memenuhi persyaratan dalam menduduki eselon III.A sesuai dengan PP.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Seorang pegawai dalam menduduki jabatan eselon III.A harus memiliki Pangkat/golongan Pembina/IV.a atau minimal setingkat dibawahnya, namun demikian adalah penting bagi Camat untuk berusaha mengembangkan diri terutama dengan meningkatkan pendidikannya menjadi

strata 2, hal ini dikarenakan wiyayah kecamatan Bukit Intan merupakan ibukota provinsi yang memiliki masyarakat dengan tingkat heterogen yang tinggi, demikian pula tingkat pendidikan Sekcam adalah S1, dengan Pangkat/Golongan Pengatur/ III.c, Kasi Pemerintahan dengan tingkat pendidikan SLTA dengan Pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I /III.d dan Kasi Trantib dengan tingkat pendidikan SLTA dan Pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I/III.d kesemuanya telah memenuhi kriteria jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dalam era globalisasi sekarang ini, pendidikan tersebut dirasa kurang. Penyebabnya adalah masyarakat yang dihadapi merupakan masyarakat ibukota yang telah menuju era modern. Dengan tingkat pendidikan yang demikian, secara aplikasi di lapangan masih kurang. Untuk itu diperlukan pelatihan dan diklat-diklat bagi aparatur kecamatan untuk meningkatkan sumber daya aparatur kecamatan.

Jabatan pada Kapolsek juga demikian. Tingkat pendidikannya adalah S1 dan untuk Sie Binmas dengan pendidikan SLTA tentunya sudah sesuai dengan peraturan, namun demikian secara aplikasi di lapangan masih kurang. Penyebabnya adalah ibukota dengan berbagai macam permasalahan yang kompleks tentunya memerlukan aparatur yang handal sehingga diharapkan dapat menanggulangi segala permasalahan yang terjadi di lapangan. .Adanya Tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang dan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 4 orang dalam sampel ini merupakan hal yang kurang sesuai sesuai pada tatanan kehidupan masyarakat ibukota provinsi. Kita semestinya tidak menemukan lagi responden dengan tingkat pendidikan SLTP/ sederajat karena masyarakat ibukota provinsi seharusnya telah memiliki tingkat pendidikan minimal SLTA/ sederajat.

Tingkat pendidikan S2 yang menurut peneliti masih sangat kurang, apalagi jika dilihat dari sudah banyaknya Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang ada di daerah ini.

### C. Uji Instrumen Penelitian

#### 1. Uji validitas

Validitas menunjukkan sejauhmana suatu kuesioner atau alat ukur mengukur apa saja yang ingin diukur (Singarimbun & Effendi, 1995). Koefisien yang signifikan mencerminkan *good item*, sedangkan insignifikan menunjukkan *poor item*. *Good item* akan ditunjukkan dengan koefisien 0.30 ke atas, sehingga akan dilakukan pengujian pertanyaan untuk menunjukkan pertanyaan tersebut valid atau tidak. Uji validitas menggunakan korelasi *pearson* yang mempunyai *coefficient correlation* untuk setiap indikator lebih besar dari 0.3 ( $>0.30$ ).

**Tabel 4.4 Uji Validitas Koordinasi**

Item Pertanyaan	N	<i>Pearson Correlation</i>	Valid / Tidak Valid
BUTIR 1	99	0,485	Valid
BUTIR 2	99	0,457	Valid
BUTIR 3	99	0,493	Valid
BUTIR 4	99	0,339	Valid

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan *pearson correlation* dari 4 butir pertanyaan signifikan karena memiliki nilai *coefficient correlation* di atas 0,30.

Kemudian dilakukan uji validitas komunikasi yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5 Uji Validitas Komunikasi**

Item Pertanyaan	N	<i>Pearson Correlation</i>	Valid / Tidak Valid
BUTIR 5	99	0,386	Valid
BUTIR 6	99	0,551	Valid
BUTIR 7	99	0,632	Valid

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa berdasarkan *pearson correlation* dari 3 butir pertanyaan signifikan karena memiliki nilai *coefficient correlation* diatas 0,30

Setelah itu dilakukan uji validitas efektivitas yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

**Tabel 4.6 Uji Validitas Efektivitas**

Item Pertanyaan	N	<i>Pearson Correlation</i>	Valid / Tidak Valid
BUTIR 8	99	0,528	Valid
BUTIR 9	99	0,357	Valid
BUTIR 10	99	0,454	Valid
BUTIR 11	99	0,539	Valid
BUTIR 12	99	0,437	Valid

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa berdasarkan *pearson correlation* dari 5 butir pertanyaan signifikan karena memiliki nilai *coefficient correlation* diatas 0,30.

## 2. Uji reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun & Effendi, 1995). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu. Reliabilitas instrumen dicari dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji reliabilitas dari ketiga variabel yang diuji,

**Tabel 4.7 Uji Reliabilitas – Koefisien Alpha**

Variabel	Jumlah Item (Valid)	Koefisien Alpha	Kesimpulan
Koordinasi	4	0,655	Reliabel
Komunikasi	3	0,702	Reliabel
Efektivitas	5	0,703	Reliabel

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel 4.7 di atas hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu koordinasi, komunikasi, efektivitas adalah reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha  $> 0,6$ .

## D. Pengaruh antar Variabel

### 1. Deskriptif Data

*Statistik Deskriptif* merupakan metode statistik yang paling umum digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. *Statistik Diskriptif* berhubungan dengan teknik untuk pencatatan, pengorganisasian dan peringkatan informasi dari data numerik (Theadore, 1985). Kemudahan dalam menggunakan metode ini menjadi salah satu alasan kenapa metode ini sering digunakan.

Kemampuan *Statistik Deskriptif* dalam menggambarkan data beserta karakternya dilanjutkan dengan statistik inferensia yang akan membahas data secara lebih mendalam dan detil. Nilai-nilai penting dan pola data dapat dilihat dalam metode ini. Dengan menggunakan *SPSS versi 17.0*, Statistik Diskriptif menjabarkan jawaban responden dalam bentuk nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Alasan responden dalam menilai koordinasi, komunikasi dan efektivitas, masing-masing pertanyaan diberikan skor 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

*Nilai minimum (min)* menggambarkan skor minimum yang diberikan responden dan *nilai maksimum* menggambarkan skor maksimum yang diberikan responden. *Nilai mean* menggambarkan rata-rata skor yang diberikan responden dan *standar deviasi* menyatakan kecenderungan deviasi data, di mana jika nilai standar deviasi mendekati nol, maka

variasi jawaban yang diberikan responden semakin homogen dan begitu pula sebaliknya, jika nilai standar deviasi menjauhi nol maka variasi jawaban yang diberikan semakin heterogen.

Hasil statistik deskriptif koordinasi disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Koordinasi**

Item Pertanyaan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BUTIR 1	99	4	5	4,36	0,483
BUTIR 2	99	2	5	4,13	0,547
BUTIR 3	99	3	5	4,39	0,550
BUTIR 4	99	2	5	4,13	0,649

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Pada variabel Koordinasi, dapat diinterpretasikan bahwa jawaban responden berkisar antara 2 sebagai nilai minimal (tidak setuju) sampai dengan 5 sebagai nilai maksimal (sangat setuju) dengan nilai rata-rata sebesar 4,256 dan nilai penyimpangan rata-rata standar deviasi sebesar 0,557 menunjukkan bahwa jawaban responden cukup bervariasi dan mendekati heterogen.

**Tabel 4.9 Koordinasi melalui Kewenangan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	63	63,6	63,6	63,6
SS	36	36,4	36,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Terdapat empat dimensi dalam variabel koordinasi, yaitu koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja dan koordinasi melalui konferensi. Tabel 4.9. menunjukkan responden setuju dengan dimensi koordinasi melalui kewenangan dengan indikator terdapat kewenangan dalam koordinasi antara Camat Bukit Intan dengan mitra kerjanya yang tertuang dalam item pertanyaan pertama. Keadaan ini diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan Camat yang menyatakan bahwa kewenangan merupakan faktor yang sangat penting karena dengan kewenangnya, Camat dapat mengundang seluruh mitra kerjanya untuk berkoordinasi tentang masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di kehidupan masyarakatnya. Kapolsek Bukit Intan menyatakan kewenangan yang diperlukan oleh Camat adalah kewenangan yang sesuai dengan Tupoksinya sebagai koordinator di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pendelegasian kewenangnya kebawah sesuai dengan bidangnya sehingga dapat terwujud pelayanan prima sampai ke masyarakat yang paling bawah secara sinergi. Hasil wawancara dengan PKK Kelurahan bahwa Camat harus memiliki kewenangan untuk mengayomi masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dalam bekerja dan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat akan bekerja mencari nafkah dengan tanpa rasa takut. Masyarakat menyatakan bahwa Camat perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya agar dia dapat bekerja dengan baik. Kewenangan itu hendaknya tertulis dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hasil pengukuran secara deskriptif dan wawancara yang dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa kewenangan merupakan hal yang penting bagi Camat dalam berkoordinasi dan melaksanakan tugasnya. Hasil ini dapat dibuktikan dari analisa secara deskriptif dan diperkuat pula dengan hasil wawancara.

**Tabel 4.10 Koordinasi melalui Konsensus**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	1,0	1,0	1,0
KS	6	6,1	6,1	7,1
S	71	71,7	71,7	78,8
SS	21	21,2	21,2	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel 4.10. dapat dilihat bahwa responden setuju apabila terdapat kesepakatan kerja dalam penanganan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hasil ini dapat diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan Camat bahwa kesepakatan kerja sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Kita harus tahu apa yang menjadi tugas kita dan apa yang menjadi tugas aparat atau orang lain. Menurut Kapolsek kesepakatan kerja itu dapat dilihat dari garis komando yang terarah serta *feedback* yang baik yang disepakati oleh seluruh aparat yang ada di wilayah kecamatan. Menurut PKK Kelurahan menyatakan bahwa perlu adanya kesepakatan kerja untuk saling mendukung antara

Camat dengan masyarakatnya, demikian juga dengan aparat vertikal lainnya sehingga mempermudah Camat dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan menurut masyarakat bahwa kesepakatan kerja yang dilakukan oleh Camat dapat berupa MOU dengan mitra kerjanya yang berada di wilayah kecamatan dan masyarakatnya sehingga masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kesepakatan.

Hasil pengukuran secara deskriptif dan hasil wawancara yang telah dilaksanakan maka peneliti berkesimpulan bahwa kesepakatan kerja dalam berkoordinasi antara Camat dengan instansi vertikal yang berada di kecamatan dan masyarakatnya merupakan hal yang penting dan tidak dapat ditinggalkan.

**Tabel 4.11 Koordinasi melalui Pedoman Kerja**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	3,0	3,0	3,0
S	54	54,5	54,5	57,6
SS	42	42,4	42,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Tabel 4.11. menunjukkan bahwa pedoman kerja memang sangat diperlukan dalam penanganan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hasil ini dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan Camat bahwa pedoman kerja harus dimiliki oleh Camat dalam melaksanakan tugas dan pedoman kerja itu dituangkan dalam Tupoksi. Tupoksi tersebut dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagai

peraturan yang sah dan tertulis. Menurut Kapolsek bahwa pedoman kerja wajib diketahui dan dimiliki oleh Camat dalam melaksanakan tugas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam tugas dan tumpangtindih dalam tugas, sedangkan menurut PKK Kelurahan bahwa pedoman kerja itu penting dan pedoman kerja itu harus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sehingga akan jelas tugas yang akan dilaksanakan oleh Camat dan apabila Camat menyimpang dari pedoman kerja tersebut maka Camat akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hampir sama yang dinyatakan oleh masyarakat bahwa pedoman kerja itu penting dan pedoman kerja itu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Camat melaksanakan tugas berdasarkan peraturan tersebut dan tidak menyimpang.

Hasil pengolahan data kuesioner secara deskriptif dan hasil wawancara yang diperoleh dari responden, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pedoman kerja merupakan hal yang penting bagi kesuksesan Camat dalam melaksanakan tugas. Pedoman kerja itu berupa peraturan yang wajib dilaksanakan ataupun yang wajib untuk tidak dilaksanakan.

**Tabel 4.12 Koordinasi melalui Konferensi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	1,0	1,0	1,0
KS	12	12,1	12,1	13,1
S	59	59,6	59,6	72,7
SS	27	27,3	27,3	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Pada tabel 4.12. dapat dilihat bahwa responden setuju apabila koordinasi dilakukan melalui konferensi, indikator yang dapat dilihat dengan adanya pertemuan rutin bulanan di kecamatan Bukit Intan. Hasil ini dapat diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan Camat bahwa konferensi merupakan hal penting. Konferensi itu dapat berupa pertemuan pertemuan rutin dan lain sebagainya. Pertemuan rutin ini gunanya agar ada kekompakan dengan mitra kerja yang lain dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dengan adanya pertemuan rutin tersebut dapat dihindari adanya miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas. Menurut Kapolsek sebaiknya pertemuan rutin bulanan diadakan dua kali sebulan yaitu pada minggu kedua dan keempat. Menurut PKK Kelurahan pertemuan rutin bulanan itu bisa sekali dalam sebulan asalkan pelaksanaannya dengan efektif, sedangkan menurut masyarakat pertemuan rutin dilaksanakan oleh Camat bisa sebulan sekali dan bisa ditambah dengan pertemuan lain bila dianggap perlu.

Hasil pengolahan data koesioner secara deskriptif dan hasil wawancara yang diperoleh dari responden, maka peneliti berkesimpulan bahwa koordinasi melalui konferensi yang dilakukan oleh Camat sangatlah penting. Konferensi yang paling mudah dilaksanakan dan paling penting dilaksanakan berupa rapat rutin bulanan yang pelaksanaannya minimal sekali dalam sebulan dan bisa ditambah jumlah rapatnya sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi wilayah kecamatan. Apabila di anggap penting Camat dapat melaksanakan rapat beberapa kali dalam sebulan.

Variabel operasional koordinasi penelitian dengan empat dimensinya menunjukkan bahwa terdapat indikator yang mampu menjelaskan alasan responden untuk setuju dengan koordinasi yang dilakukan oleh Camat Bukit Intan kepada masyarakatnya. Berdasarkan tabel di atas dari 99 responden, rata-rata responden menyatakan setuju dengan koordinasi yang dilakukan oleh Camat. Koordinasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Camat dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas umum pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Dengan koordinasi akan didapat hasil yang terbaik serta meminimalisir kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas.

Penjelasan mengenai deskriptif statistik Komunikasi disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Komunikasi**

Item Pertanyaan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BUTIR 5	99	2	5	4,32	0,636
BUTIR 6	99	2	5	3,97	0,646
BUTIR 7	99	3	5	4,24	0,656

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Tabel di atas menunjukkan kepada kita bahwa responden menjawab pertanyaan berkisar antara 2 (tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju) dengan nilai rata-rata sebesar 4,18. Nilai penyimpangan rata-rata standar deviasi sebesar 0,646 menunjukkan bahwa jawaban responden cukup bervariasi dan mendekati heterogen.

**Tabel 4.14 Kredibilitas Sumber**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	6	6,1	6,1	7,1
	S	52	52,5	52,5	59,6
	SS	40	40,4	40,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Tabel 4.14. menunjukkan bahwa responden setuju dengan dimensi komunikasi melalui *kredibilitas sumber* dengan indikator adanya kemampuan Camat untuk membahas dan menanggulangi masalah kamtibmas yang tertuang dalam item pertanyaan kelima. Hasil ini diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan Camat yang menyatakan bahwa kredibilitas merupakan hal yang penting karena Camat wajib mempunyai kemampuan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam hal perencanaan, seorang Camat diharapkan mempunyai ide yang cemerlang dan dalam pelaksanaan dia mampu menanggulangi masalah yang ada di dalam lingkungan masyarakatnya. Menurut Kapolsek bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh Camat adalah kemampuan memimpin yang tegas namun harus dilandasi dengan kearifan dan berlaku bijaksana. PKK Kelurahan mengatakan bahwa Camat harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah, menurut masyarakat, kemampuan seorang Camat adalah kemampuan memimpin yang tinggi dan berwibawa, bijaksana dalam mengambil keputusan.

Hasil pengolahan data kuesioner yang dipaparkan secara deskriptif dan hasil wawancara yang diperoleh dari responden, maka peneliti menyimpulkan bahwa kredibilitas Camat merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang Camat. Dengan kredibilitasnya yang tinggi, seorang Camat dapat memimpin wilayah dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Seperti banyak ulama mengatakan bahwa tempatkanlah seorang pemimpin itu sesuai dengan keahliannya agar pekerjaannya dapat berhasil dengan baik.

**Tabel 4.15 Daya Tarik Sumber**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	1,0	1,0	1,0
KS	19	19,2	19,2	20,2
S	61	61,6	61,6	81,8
SS	18	18,2	18,2	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel 4.15. dapat dilihat bahwa responden setuju dengan dimensi *daya tarik sumber* Camat sehingga masalah yang dibahas menjadi ketertarikan masyarakat. Menurut Camat sendiri, daya tarik merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang Camat karena dengan daya tariknya seorang Camat maka masyarakat akan termotivasi untuk bersama-sama dengan Camat menanggulangi masalah-masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi diwilayahnya. Menurut Kapolsek seorang Camat perlu memiliki daya tarik yang berwibawa dan kharismatis. Menurut PKK Kelurahan bahwa seorang Camat harus pandai bergaul dan

pandai bersosialisasi sehingga Camat dapat diterima dengan baik dalam melaksanakan tugas kemasyarakatannya, sedangkan menurut masyarakat, daya tarik yang dimiliki oleh Camat harus sesuai dengan aturan, jangan sampai berlebihan dan menyimpang dari tujuan organisasi..

Hasil kuesioner yang dipaparkan secara deskriptif dan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden dapat disimpulkan peneliti bahwa daya tarik merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang Camat. Dengan daya tariknya, maka seorang Camat dapat mengajak seluruh komponen masyarakat diwilayahnya dan juga instansi terkait lainnya untuk bersama-sama menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya sehingga persatuan dan kesatuan dapat tercipta dengan baik.

**Tabel 4.16 Kekuatan Sumber**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	12	12,1	12,1	12,1
	S	51	51,5	51,5	63,6
	SS	36	36,4	36,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Pada tabel 4.16 dalam dimensi *kekuatan sumber* menunjukkan adanya kekuatan dan otoritas Camat untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam bidang kamtibmas. Dalam hal 99 responden setuju dengan komunikasi yang dilakukan oleh Camat. Hasil ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Camat bahwa kekuatan

dan otoritas sangat diperlukan oleh Camat dalam mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada diwilayahnya untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban. Dan apabila terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat, maka Camat memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menggerakkan masyarakat agar mampu menanggulangi masalah tersebut. Menurut Kapolsek, Camat harus memiliki kekuatan dalam mengatur RT/RW sebagai aparat yang membantu Camat yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya. PKK Kelurahan menyatakan, Camat harus memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat agar berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan umpamanya tamu wajib lapor 1 X 24 jam, sedangkan menurut masyarakat, Camat harus memiliki kekuatan dan otoritas untuk memaksa masyarakat agar secara bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.

Hasil penilaian kuesioner dan diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan dan otoritas merupakan hal yang penting dan harus dimiliki oleh seorang Camat. Dengan kekuatan dan otoritasnya Camat dapat berperan aktif ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya, namun harus disadari bahwa kekuatan dan otoritas tersebut harus mempunyai landasan hukum yang sah. Landasan hukum ini dapat berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan

Daerah. Dengan landasan hukum yang sah, maka Camat mempunyai kekuatan hukum yang sah pula dalam melaksanakan tugasnya.

Penjelasan mengenai deskriptif statistik Efektivitas disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.17 Statistik Deskriptif Efektivitas**

Item Pertanyaan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BUTIR 8	99	3	5	4,29	0,476
BUTIR 9	99	3	5	4,16	0,566
BUTIR 10	99	3	5	4,16	0,548
BUTIR 11	99	3	5	4,29	0,558
BUTIR 12	99	2	5	4,16	0,531

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Pada variabel Efektivitas, responden menjawab pertanyaan berkisar antara 2 (Tidak Setuju) sampai dengan 5 (Sangat Setuju) dengan nilai rata-rata sebesar 4,21. Nilai penyimpangan rata-rata standar deviasi sebesar 0,536 menunjukkan bahwa responden cukup bervariasi dan mendekati heterogen dengan nilai rata-rata standar deviasi menjauhi nol.

**Tabel 4.18 Dimensi Produksi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1,0	1,0	1,0
	S	68	68,7	69,4	70,4
	SS	29	29,3	29,6	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa responden setuju dengan dimensi efektivitas melalui produksi dengan indikator adanya *suatu manfaat* dari penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan yang tertuang dalam item pertanyaan kedelapan. Hasil ini diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan Camat bahwa hendaknya tugas yang dilaksanakan oleh Camat dapat merupakan suatu produksi dan produksi tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Menurut Kapolsek bahwa tugas yang dilaksanakan oleh Camat dapat menimbulkan produksi hasil kerja dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan diharapkan pula ada timbal balik dari masyarakat yang berupa kepedulian sosial dari masyarakat terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Camat sebagai pelaksananya. PKK Kelurahan berpendapat bahwa kerja yang dilakukan oleh Camat merupakan suatu produksi dan produksinya adalah dapat terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, sedangkan menurut masyarakat bahwa tugas yang dilaksanakan oleh Camat adalah sesuatu yang diproduksi oleh Camat baik itu secara sendiri maupun bersama-sama dengan aparat kecamatan dan instansi yang berada di kecamatan dan produksi itu salah satunya adalah terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hasil yang terpenting bagi masyarakat adalah bahwa mereka dapat merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya serta tidak terjadi keributan dan gangguan keamanan lainnya.

Hasil dari deskriptif data kuesioner dan hasil wawancara terhadap responden peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerja yang dilakukan oleh

Camat merupakan suatu produksi yaitu produksi kerja dan produksi kerja itu nyata di masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai bahwa inilah hasil kerja Camat sebagai aparatur Pemerintah.

**Tabel 4.19 Dimensi Efisiensi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	9	9,1	9,1	9,1
S	65	65,7	65,7	74,7
SS	25	25,3	25,3	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa responden setuju dengan *dimensi efisiensi* dengan indikator adanya fasilitas dan modal dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan Bukit Intan. Hasil ini diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan Camat bahwa apa yang dikerjakan oleh Camat dalam pelaksanaan tugasnya hendaknya seefisien mungkin baik dalam menggunakan waktu, dana dan tenaga dalam arti dengan menggunakan modal sekecil-kecilnya guna menghasilkan barang yang sebesar-besarnya, namun dalam hal ini harus juga dimengerti bahwa tugas Camat bukanlah sektor swasta yang semata-mata mencari keuntungan, tetapi tugas Camat adalah pelayanan publik yang tidak mencari keuntungan namun bermanfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Kapolsek yang perlu diperhatikan adalah terbentuknya fasilitas masyarakat untuk menyampaikan pendapat/keluhan sebagai wadah untuk berembuk dan menyelesaikan permasalahan serta modalnya adalah saling menghargai dan saling memiliki antar anggota masyarakat. Menurut PKK

Kelurahan untuk melaksanakan tugas diperlukan fasilitas agar efisien. Fasilitas maupun modal dari pemerintah dan masyarakat akan saling menutupi guna menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat misalnya dalam membangun Poskamling yang dana serta bahannya dari dana pemerintah, sedangkan tenaga kerjanya dari swadaya gotong royong masyarakat, demikian pula menurut masyarakat bahwa agar tugas Camat dapat menjadi efisien, diperlukan fasilitas. Fasilitas tersebut dapat berupa dana untuk pembangunan dan dana untuk operasional serta dana perawatan. Dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut sangat terbatas, maka harus dapat digunakan seefisien mungkin.

Hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden, peneliti menyimpulkan bahwa tugas yang dilakukan oleh Camat harus tersistem, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan dan evaluasi harus dilakukan seefisien mungkin karena dana yang diberikan oleh pemerintah terbatas. Efisien harus menjadi acuan dalam penggunaan modal walaupun tugas Camat adalah tugas pelayanan publik yang tidak mencari keuntungan pribadi.

**Tabel 4.20 Dimensi Kepuasan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	8	8,1	8,1	8,1
	S	67	67,7	67,7	75,8
	SS	24	24,2	24,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Pada tabel 4.20 menunjukkan responden menyatakan *kepuasannya* dengan sikap pelayanan aparat kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan Camat bahwa dalam hal pelayanan masyarakat bahwa diutamakan kepuasan masyarakat, walaupun perlu disadari bahwa tingkat kepuasan masyarakat relatif sifatnya namun Camat beserta aparturnya akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kepuasan masyarakat dalam berurusan dan berhubungan dengan aparatur kecamatan, bahkan kecamatan menyediakan kotak saran bagi masyarakat. Saran tersebut dapat berupa penilaian masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Kapolsek bahwa perlu adanya sikap tanggap, jujur, cepat dan adil serta dapat memberikan pelayanan prima yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan demikian diharapkan tercipta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah kepada warga masyarakatnya. PKK Kelurahan berpendapat bahwa perlu adanya sikap yang bersahabat dan peduli terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak takut untuk melapor suatu kejadian gangguan keamanan yang terjadi diwilayahnya, apabila sikap tersebut tidak dimiliki oleh pemerintah, maka masyarakat akan bersifat apatis dan acuh terhadap kejadian yang terjadi disekitarnya. Masyarakat mengharapkan perlu adanya sikap santun dan bijaksana dari aparatur pemerintah yaitu Camat, jangan sampai masyarakat dipersulit apabila minta bantuan kepada Camat atau aparatur kecamatan lainnya.

Hasil kuesioner dan wawancara yang dilaksanakan terhadap responden di atas menciptakan suatu kesimpulan bagi peneliti bahwa

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Camat merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh Camat. Kepuasan ini dapat diciptakan dengan adanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya hubungan baik, hal-hal yang kurang baik bisa diperbaiki dan hal-hal yang sudah baik akan tetap terjalin baik.

**Tabel 4.21 Dimensi Keadaptasian**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	5	5,1	5,1	5,1
	S	60	60,6	60,6	65,7
	SS	34	34,3	34,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Tabel 4.21 menunjukkan Camat memiliki *kemampuan adaptasi* yang baik dengan indikator adanya keinginan/partisipasi masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Camat berpendapat bahwa adaptasi yang baik harus dimiliki oleh seorang Camat apabila dia ingin sukses dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan adaptasi ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang selalu bergerak maju dan berubah mengikuti perkembangan. Apabila Camat tidak mampu beradaptasi, maka dia akan terlindas oleh jaman. Menurut Kapolsek bahwa kemampuan adaptasi seorang Camat tentunya akan menciptakan rasa memiliki, kepedulian dan pengabdian terhadap lingkungan, disamping itu partisipasi masyarakat dalam hal koordinasi dan menjaga lingkungan akan tercipta dengan baik. Menurut PKK Kelurahan bahwa apabila seorang Camat dapat beradaptasi dengan baik terhadap

masyarakatnya, maka masyarakat akan berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya dengan cara melaksanakan siskamling maupun iuran untuk membayar penjaga malam, sedangkan menurut masyarakat apabila Camat beradaptasi dengan baik terhadap masyarakatnya, maka masyarakat tidak berkeberatan untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan ronda keliling ataupun kewajiban melapor bagi warga pendatang dan tamu.

Hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden, maka peneliti berkesimpulan bahwa seorang Camat harus mempunyai kemampuan beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Dengan adaptasi yang baik, akan tercipta partisipasi masyarakat yang baik sehingga ketentraman dan ketertiban masyarakat akan terwujud dengan baik pula. Adaptasi yang dilakukan oleh Camat hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan masalah lain.

**Tabel 4.22 Dimensi Kelangsungan Hidup**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	4	4,0	4,1	5,1
	S	71	71,7	72,4	77,6
	SS	22	22,2	22,4	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Pada tabel 4.22 menunjukkan responden setuju bahwa meningkatnya *kelangsungan hidup* dengan indikator adanya kemajuan dalam penanganan masalah ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Camat bahwa kelangsungan hidup bermasyarakat harus terjalin dengan baik sehingga dari waktu ke waktu akan terlihat kemajuan dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik. Agar kelangsungan hidup itu terus meningkat perlu didukung oleh masyarakat. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar semakin baik, perlu adanya kesatuan gerak antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama bekerja serta berusaha menciptakan suasana aman dan nyaman dilingkungannya, kerja sama yang baik akan menciptakan suasana lingkungan yang baik pula. Menurut Kapolsek kemajuan dalam pelaksanaan tugas harus terjadi dalam waktu yang akan datang. Untuk itu perencanaan harus matang, pelaksanaan harus benar dan perubahan harus sesuai dengan waktu dan keadaan. Apabila tindakanj ini telah dilakukan maka tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat akan semakin baik dan maju. Menurut PKK Kelurahan diharapkan agar setiap tahun terjadi penurunan tentang terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat, bila mungkin tidak terjadi kasus pencurian, perampokan, perkelahian dan lain-lain gangguan keamanan dimasyarakat khususnya pada anak-anak dan kaum perempuan. Menurut masyarakat adanya harapan bahwa gangguan keamanan akan berkurang setiap tahunnya walaupun hal ini sangat berhubungan erat dengan faktor ekonomi masyarakat.

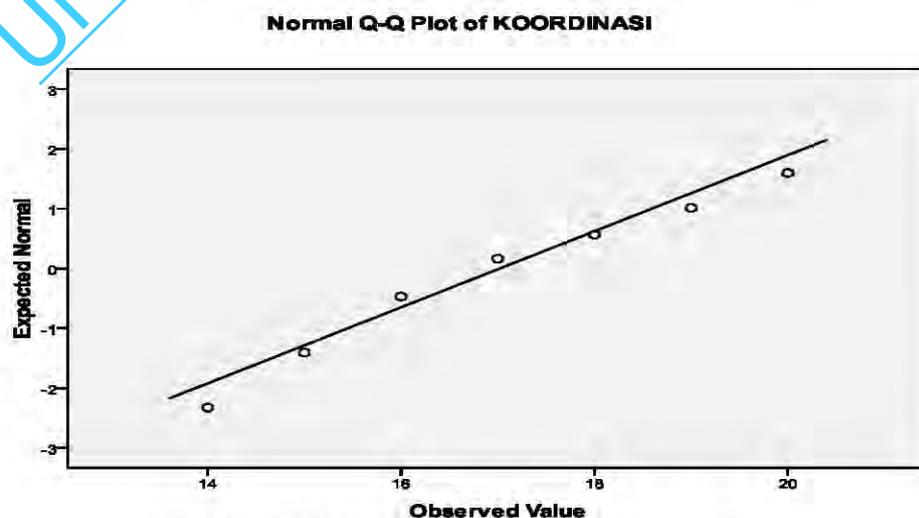
Dari kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden, maka peneliti berkesimpulan bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dalam dan lingkungan luar organisasi. Dalam kenyataannya tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat akan tercipta dengan baik apabila terjalinnya kerjasama dengan baik antara pemerintah dan seluruh komponen yang ada di masyarakat.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji atau mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Uji Normalitas ini menggunakan grafik *normal Q-Q plots of regression*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model memenuhi asumsi normalitas, begitu juga sebaliknya.

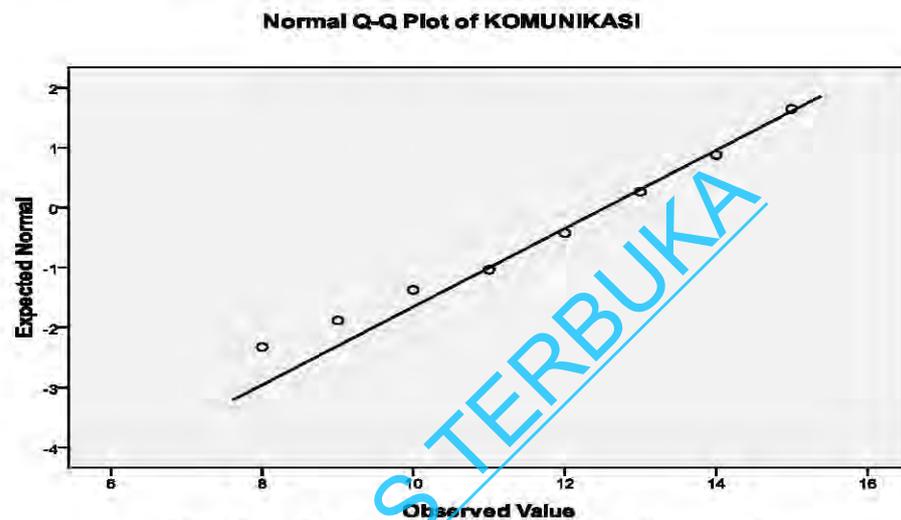
Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Koordinasi**

Garis diagonal dalam grafik menggambarkan keadaan ideal dari data, titik-titik berada sangat dekat dan bahkan menempel pada garis diagonal, artinya data koordinasi berdistribusi normal.

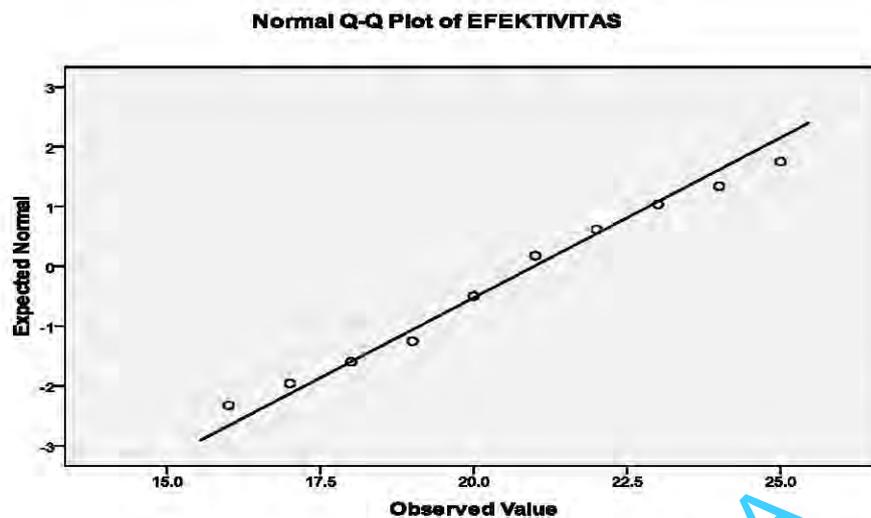
Pengujian untuk data komunikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Komunikasi**

Garis diagonal dalam grafik menggambarkan keadaan ideal dari data, titik-titik berada sangat dekat dan bahkan menempel pada garis diagonal, artinya data komunikasi berdistribusi normal.

Pengujian untuk data efektifitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Garis diagonal dalam grafik menggambarkan keadaan ideal dari data, titik-titik berada sangat dekat dan bahkan menempel pada garis diagonal, artinya data efektifitas berdistribusi normal.



**Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Efektifitas**

#### **b. Uji multikolinieritas**

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana satu atau lebih Variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya atau dengan kata lain suatu variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya.

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat besarnya *Tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.23 Hasil Uji Multikolinieritas**

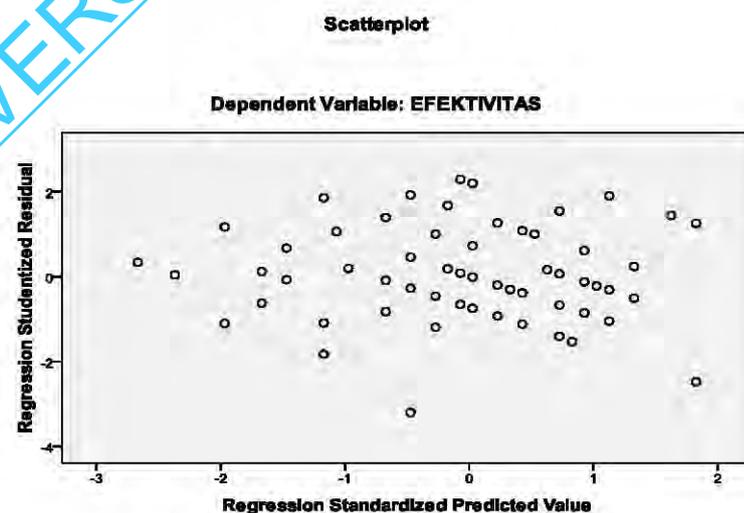
	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Koordinasi	0,570	1,755	Tidak ada multikolinieritas
Komunikasi	0,570	1,755	Tidak ada multikolinieritas

Sumber : Data diolah hasil dari kuesioner

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 ( $0,570 > 0,10$ ), artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 ( $1,755 < 10$ ), artinya tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

### c. Uji heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat nilai varians antar nilai Y, apakah sama atau heterogen. Untuk pengujian tersebut digunakan *Partial Regression Plot* dengan diagram antara *Residual* dengan *Predicted value*. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut ini



Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

**Gambar 4.4 Hasil Plot Normal**

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat sebaran data menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau garis trend tertentu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Regresi linier berganda

Hasil perhitungan dengan program *SPSS*, diperoleh nilai Regresi Linear Berganda antara variabel X1, yaitu Koordinasi, variabel X2, yaitu Komunikasi, dan Variabel Y, yaitu Efektivitas. Nilai dari masing-masing koefisien dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.24 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Constant	8,606	5,654	0,000
Koordinasi	0,257	2,193	0,031
Komunikasi	0,639	5,331	0,000
R2	0,470		
F	42,613		0,000

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 8.606 + 0,257 X_1 + 0,639 X_2$$

Nilai intersep dan nilai koefisien dari masing-masing variabel di antaranya Koordinasi (X1), Komunikasi (X2), dan Efektivitas (Y) dalam persamaan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 8.606 menyatakan bahwa jika tidak ada kedua variabel bebas, maka efektivitas sebesar 8.606.
- 2) Nilai koefisien sebesar 0,257 menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi sebesar 1 akan meningkatkan efektivitas sebesar 0,257.
- 3) Nilai koefisien sebesar 0,639 menunjukkan bahwa peningkatan komunikasi sebesar 1 akan meningkatkan efektivitas sebesar 0,639.

#### b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.25 Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,06	1,522		5,654	0,000
KOORDINASI	0,257	0,117	.216	2,193	0,031
KOMUNIKASI	0,639	0,120	.525	5,331	0,000

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel diatas nilai uji t menunjukkan tingkat signifikansi konstanta dan variabel independent.

- 1) Nilai t hitung konstanta  $>$  t tabel ( $5,654 > 1,96$ ) dan signifikansi variabel konstanta ; sig. =  $0,000 < 0,05$  ini menunjukkan bahwa konstanta mempengaruhi secara signifikan dalam regresi berganda.
- 2) Nilai t hitung variabel koordinasi  $>$  t tabel ( $2,193 > 1,96$ ) dan signifikansi variabel koordinasi ; sig =  $0,031 < 0,05$  ini menunjukkan bahwa variabel koordinasi berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas dalam regresi berganda.
- 3) Nilai t hitung variabel komunikasi  $>$  t tabel ( $5,331 > 1,96$ ) dan signifikansi variabel komunikasi ; sig =  $0,000 < 0,05$  ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas dalam regresi berganda.

### c. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel koordinasi dan variabel komunikasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas.

**Tabel 4.26 Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	160,815	2	80,407	42,613	0,000 <sup>a</sup>
	Residual	181,145	96	1,887		
	Total	341,960	98			

a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI , KOORDINASI

b. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai  $F$  hitung = 42,613 < nilai  $F$  tabel = 0,206 dengan nilai sig. = 0,000 < 0,05.  $H_0$  ditolak. Ini menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi efektivitas.

#### **4. Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban. Kenyataan ini ditunjukkan dengan besarnya nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,193 dan signifikansi variabel koordinasi lebih kecil dari 0,05 ( $0,031 < 0,05$ ), artinya variabel koordinasi yang dilakukan Camat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan.

Hasil ini didukung oleh hasil wawancara dengan pihak PKK Kelurahan tentang bentuk kesepakatan kerja dengan instansi lain dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan yang menyatakan:

“Kesepakatan untuk saling mendukung antara Camat dengan masyarakatnya dalam setiap kegiatan yang menyangkut masyarakat. Hendaknya Camat untuk saling berkoordinasi dengan aparat vertikal lainnya dan masyarakatnya. Dengan koordinasi yang baik akan mempermudah bagi Camat dalam melaksanakan tugasnya”.

Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan bentuk kewenangan yang dimiliki camat dalam koordinasi dengan mitra kerjanya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat:

“Kewenangan untuk mengayomi masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dalam bekerja dan berkehidupan bermasyarakat. Pengaruhnya sangat besar karena masyarakat dapat mencari nafkah tanpa rasa takut terjadinya gangguan keamanan ketentraman”.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat bahwa di dalam suatu koordinasi harus ada keseimbangan, keserasian, keselarasan, kesatuan, dan sinkronisasi menuju tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya (Handyaningrat, 1994:80). Koordinasi dapat dilakukan secara efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan melakukan koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, dan koordinasi melalui konferensi (Handyaningrat, 1994:19).

#### **5. Pengaruh Komunikasi terhadap Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban. Hasil ini ditunjukkan dengan besarnya nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,331 dan signifikansi variabel komunikasi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), artinya variabel komunikasi yang dilakukan Camat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan.

Hasil ini didukung oleh hasil wawancara dengan pihak masyarakat tentang bentuk kemampuan, daya tarik, dan kekuatan dan otoritas Camat untuk membahas dan menanggulangi masalah kamtibmas yang menyatakan:

“Kemampuan memimpin yang tinggi dan berwibawa, bijaksana dalam mengambil keputusan. Daya tarik yang sesuai dengan aturan. Jangan sampai berlebihan dan menyimpang dari tujuan organisasi. Kekuatan dan otoritas untuk memaksa masyarakat agar secara bersama-sama dapat menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya”.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Sendjaja (2009:93) yang menyatakan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan berhasil efektif, harus memiliki prinsip dasar yang harus dipenuhi sumber. Prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh sumber komunikasi yang efektif itu ada tiga macam yaitu kredibilitas sumber, daya tarik sumber, dan kekuatan sumber. Tiga prinsip dasar diatas diuraikan masyarakat dalam bentuk sumber memiliki kekuatan/power seperti kharisma, wibawa otoritas, dan daya tarik yang dimiliki sumber.

#### **6. Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi terhadap Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban. Hasil ini ditunjukkan dengan besarnya nilai  $f_{hitung}$  sebesar 42,613 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), artinya koordinasi dan komunikasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan.

Hasil ini sesuai dengan pendapat bahwa efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan

waktu) telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Hidayat, 1986). Target yang tercapai dapat dilihat dari output yang tercipta seperti besarnya manfaat dari penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan, adanya fasilitas dan modal, sikap aparat yang berorientasi pelayanan, munculnya keinginan/partisipasi dari masyarakat, dan meningkatnya penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan. Output tersebut mengacu pada kriteria efektivitas organisasi yang terdiri dari lima unsur yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan kelangsungan hidup (Donnelly, 1984:129).

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi camat berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,193 dan signifikansi variabel koordinasi lebih kecil dari 0,05 ( $0,031 < 0,05$ ). Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden dengan empat item pertanyaan yang secara keseluruhan menghasilkan nilai positif.
2. Komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,331 dan signifikansi variabel komunikasi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden dengan tiga item pertanyaan yang secara keseluruhan menghasilkan nilai positif.
3. Koordinasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas ketentraman dengan nilai  $f_{hitung}$  sebesar 42,613 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden dengan lima item pertanyaan yang secara keseluruhan menghasilkan nilai positif.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang diberikan adalah

1. Koordinasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka Camat Bukit Intan hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dengan aparat terkait dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban yang berada di lingkungan kecamatan Bukit Intan beserta seluruh komponen masyarakat diwilayahnya dengan memprioritaskan pada evaluasi kesepakatan kerja, pedoman kerja, dan pertemuan rutin dalam penanganan ketentraman dan ketertiban. Camat hendaknya memperbanyak melaksanakan koordinasi formal melalui rapat-rapat dinas yang diadakan di kantor kecamatan melalui rakor kecamatan yang kegiatannya bisa ditambah menjadi dua kali atau tiga kali dalam sebulan, maupun melalui koordinasi informal yaitu kunjungan-kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Camat baik kunjungan kelompok maupun kunjungan perorangan langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa Camatnya adalah pengayom masyarakat yang baik.
2. Komunikasi mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka Camat Bukit Intan hendaknya meningkatkan komunikasi yang telah terjalin dengan aparat terkait dan seluruh masyarakat diwilayahnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dengan memprioritaskan pada peningkatan kemampuan Camat untuk

menanggulangi masalah kamtibmas, dan memberdayakan daya tarik dan otoritas camat untuk mengajak masyarakat lebih berperan aktif dalam bidang kamtibmas. Komunikasi yang paling mudah dan sangat diharapkan oleh masyarakat adalah komunikasi langsung yang berupa tatap muka di masyarakat. Komunikasi tidak harus melulu di kantor dan bersifat formal. Untuk itu disarankan agar Camat lebih sering mengunjungi masyarakat di wilayahnya dan berkomunikasi dengan masyarakatnya secara langsung. Informasi melalui perwakilan ataupun melalui pihak ketiga sering kali menjadikan suatu kegagalan Camat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

3. Koordinasi dan komunikasi sama-sama mempunyai pengaruh yang besar terhadap efektivitas ketentraman dan ketertiban masyarakat maka Camat hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat dan aparat terkait yang berada di organisasi kecamatan. Koordinasi dan komunikasi dapat dilaksanakan secara serentak dalam suatu kegiatan. Untuk itu disarankan kepada Camat untuk lebih sering turun kemasyarakatnya sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat diterima langsung oleh Camat. Seorang Camat diharapkan mengefektifkan kunjungan kerja di kelurahan-kelurahan dalam wilayahnya, baik sendiri maupun bersama rombongan untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat sebab pepatah mengatakan titip uang bisa kurang, titip omongan bisa lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusyana, Y dan Islandsript. (2011). *Olah Data Skripsi dan Penelitian dengan SPSS 19*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arikunto,S. (1993). *Suatu Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. (1989). *Dasar- dasar Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, R. (1988). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Chester , B (1938). *The Functions of Executive*. Cambridge Harvard University Press.
- Donnelly, et.al. (1996). *Manajemen*. edisi 9 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Echols, J.,M dan Shadily, H. (2010). *Kamus Inggris Indonesia*. Cetakan XXIX. Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.
- Edwards III. (1980). *The Policy Predicament, Making and Implementing Public Polic.*, San Francisco: W.H. Truman.
- Effendy, dan uchjana. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Cetakan ke dua puluh dua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handayaniingrat. (1994). *Azaz-azaz Organisasi Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasibuan, SP (1995), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke tujuh Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Irawan, P. (2009). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Modul UT. Cetakan ke empat. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kotter, P and Hessket. (1992). *Dasar-dasar Pemasaran (Principles of Marketing)* Jilid I. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi ke sepuluh. Yogyakarta: Andi.
- Manan, B. (1994). *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, Hi, dan Martini. (1994). *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Cetakan ke tujuh. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Robbins, S. (1989). *Perilaku Organisas.*, Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Robert et.al. (1978). *The Nature of Social Studies, Saduran Buchari Alma dan Haslagumawan, Hakekat Dasar Studi Sosial*. Bandung: Sinar Baru.
- Sendjaja, S. (2008). *Teori Komunikasi*. Cetakan ke tiga. Jakarta: Universitas Terbuka.
- ..... (2009). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cetakan ke lima. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, SP. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ..... (1997). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun. (1989). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta. LP3ES.
- Singarimbun, M dan Efftendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suganda. (1988). *Masalah Otonomi serta hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiono. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Alfabeta ISBN.
- Sumantri, E dan Wasistiono, S, (2003) *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung, Penerbit Fokus Medis
- Sutarto, Drs. (1997). *Dasar-dasar Organisasi*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Syafrudin. (1976). *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II*. Bandung: Mandar Maju.
- Uchjana, O. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Thoha. (1991). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT.Raja Grafinda Persada.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008, tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 tahun 2011, tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan

Keputusan Camat Bukit Intan Nomor 08/KEP/BI/X/2010, tentang Rencana Strategis kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang

### **Dokumen dari Internet :**

Hidayat, (1986), Pengertian Efektivitas, diambil tanggal 29 Mei 2012, dari situs World Wide Web <http://wikipedia.org/wiki/Pengertian> efektivitas

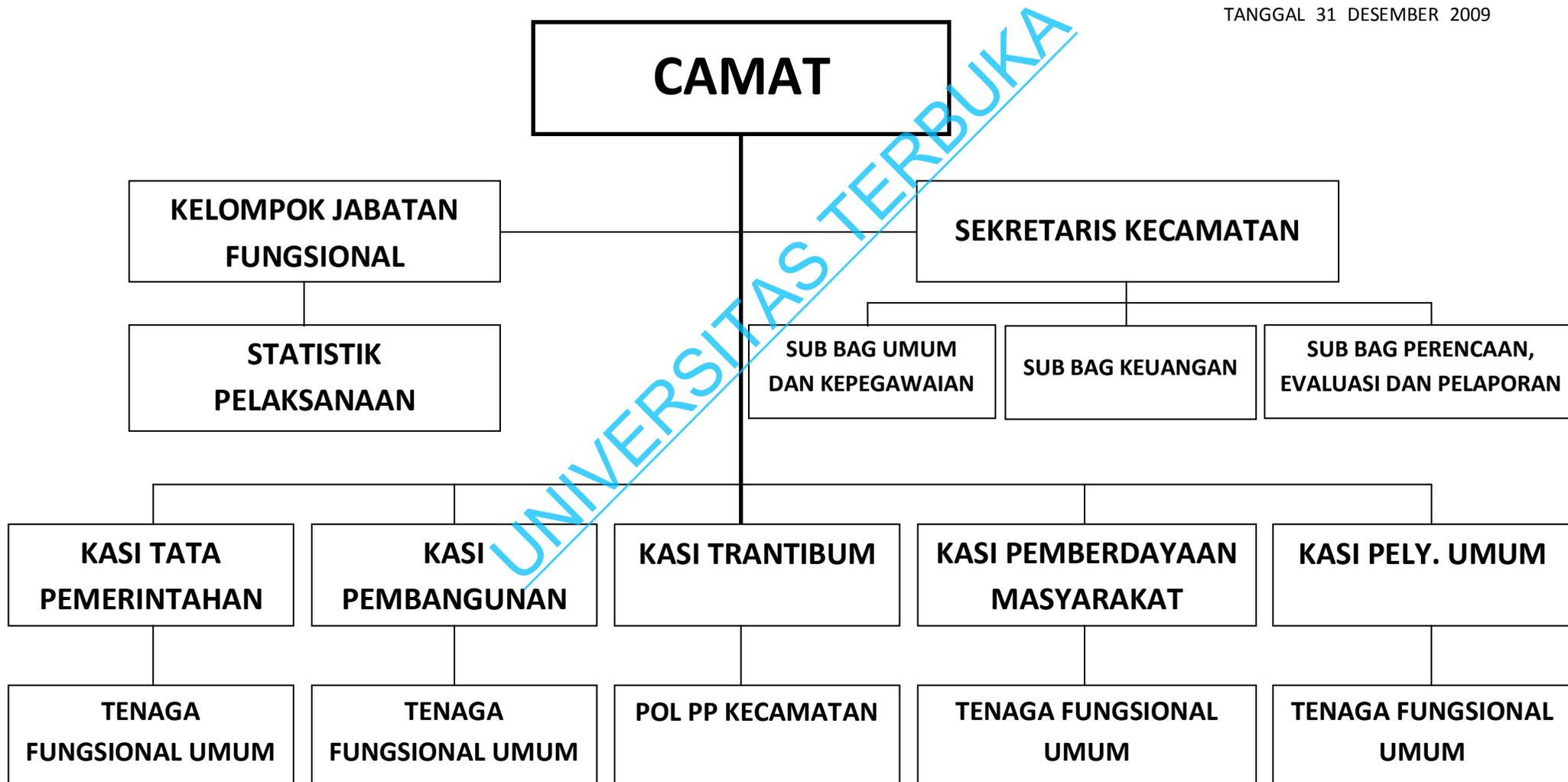
Makalah tentang pendidikan/belajar psikologi, diambil tanggal 5 Feb 2012 dari situs Word WideWeb <http://wikipedia.Org> Pengertian Pendidikan

Saksono, P.Budi, Pengertian Efektivitas, diambil tanggal 29 Mei 2012, dari situs World Wide Web <http://Wikipedia.Org/wiki> Pengertian efektivitas

Satria, (2011), Pengertian Efektivitas, diambil tanggal 13 April 2012 dari situs <http://ai.Shvoong.com/business-management/human-resources/2186154-pengertian-efektivitas>

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN BUKIT INTAN**

PERDA KOTA PANGKALPINANG  
NO. 25 TAHUN 2009  
TANGGAL 31 DESEMBER 2009

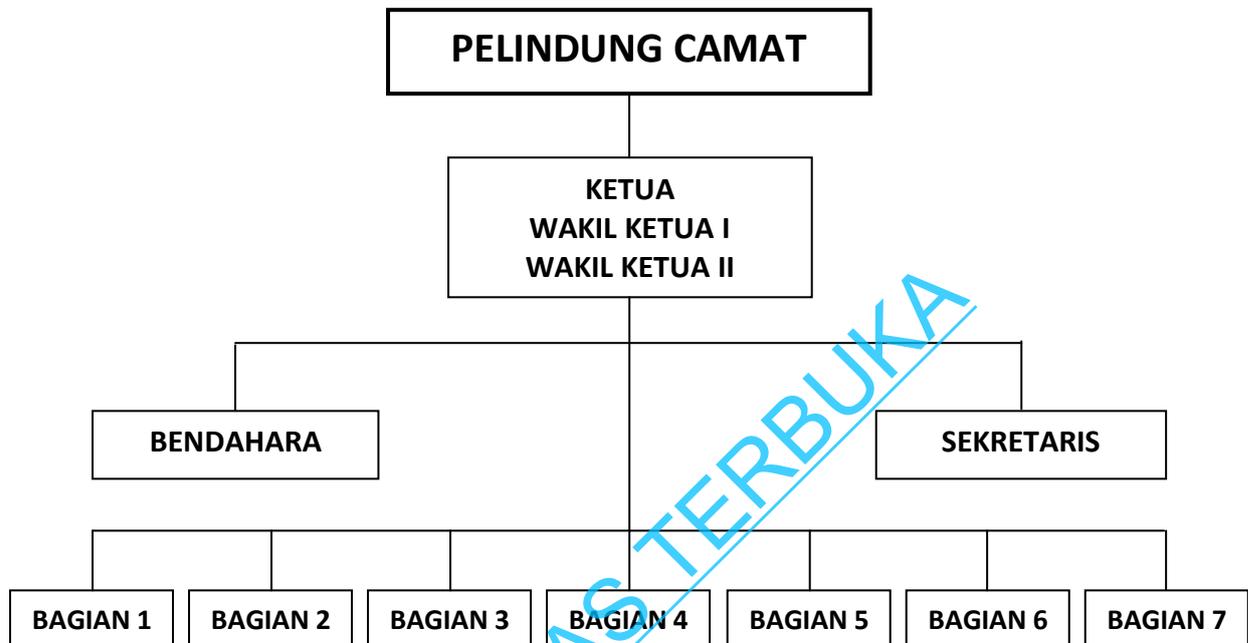


## Lampiran 6

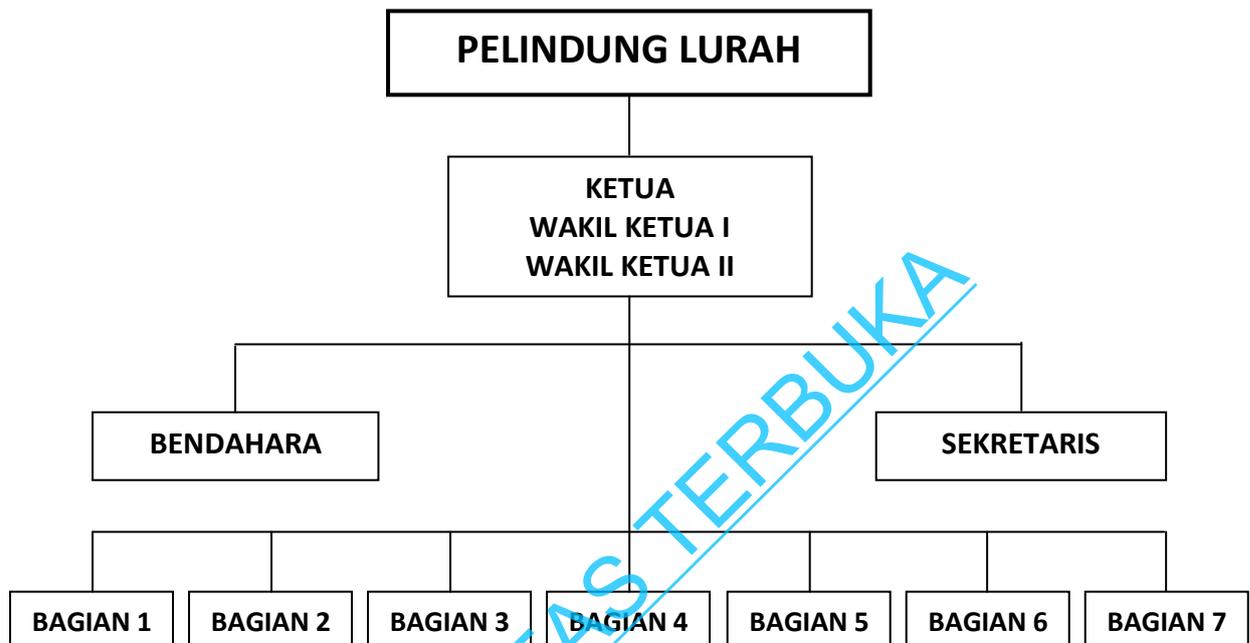
## STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

PERDA KOTA PANGKALPINANG  
NO. 25 TAHUN 2009  
TANGGAL 31 DESEMBER 2009



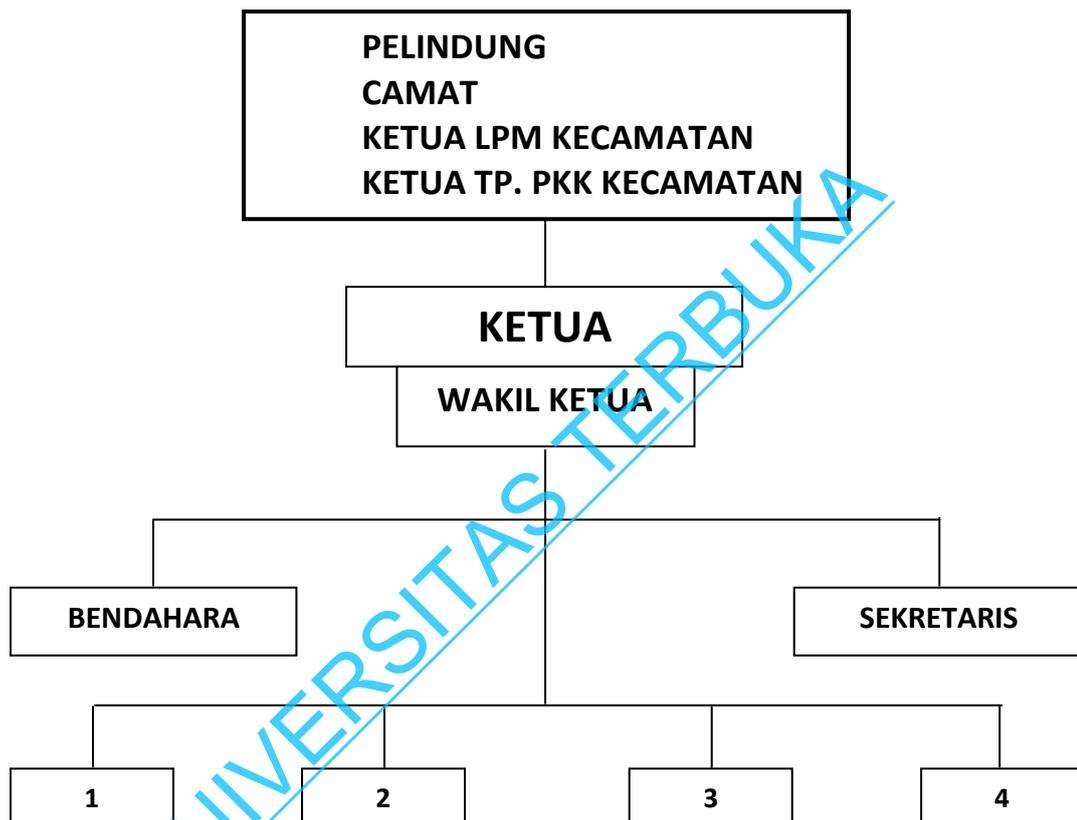
**STRUKTUR ORGANISASI LPM KECAMATAN**

1. Bagian Pendidikan
2. Bagian Kependudukan, Lingkungan dan Kesehatan
3. Bagian Pemberdayaan Perempuan
4. Bagian Agama
5. Bagian Pembangunan
6. Bagian Umum
7. Bagian Pemuda dan Olahraga

**STRUKTUR ORGANISASI LPM KELURAHAN**

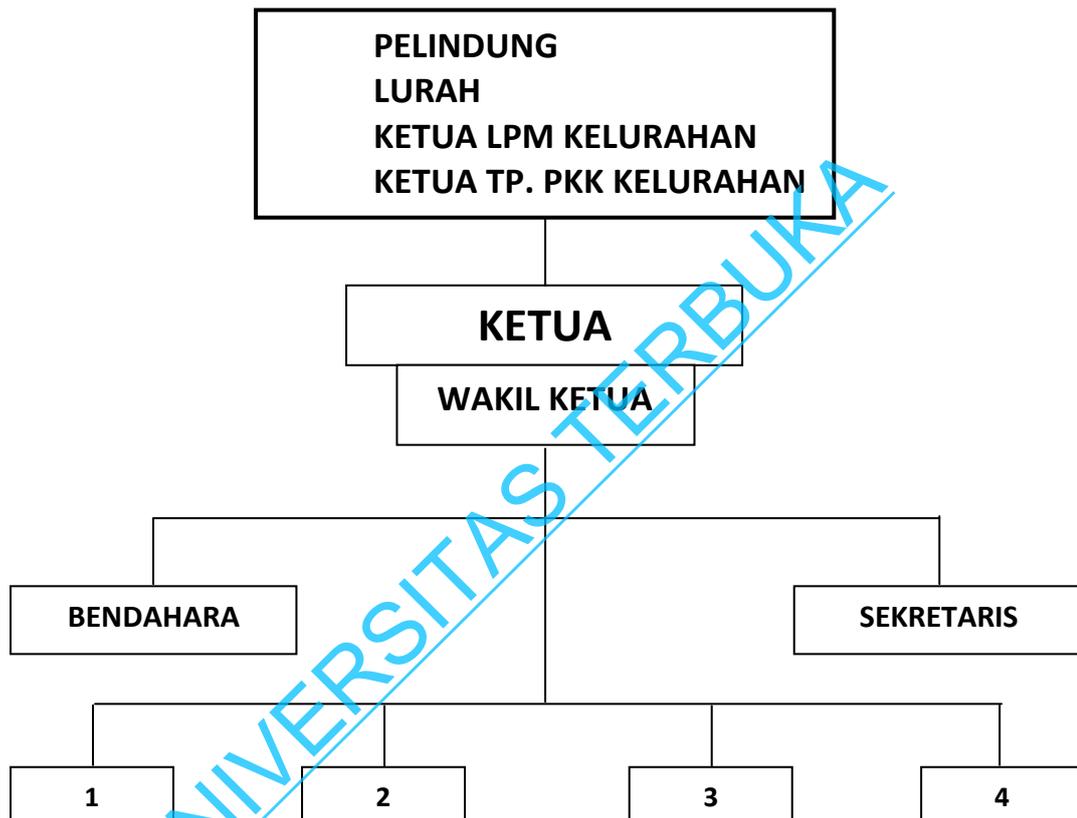
1. Bagian Pendidikan
2. Bagian Kependudukan, Lingkungan dan Kesehatan
3. Bagian Pemberdayaan Perempuan
4. Bagian Agama
5. Bagian Pembangunan
6. Bagian Umum
7. Bagian Pemuda dan Olahraga

## STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN

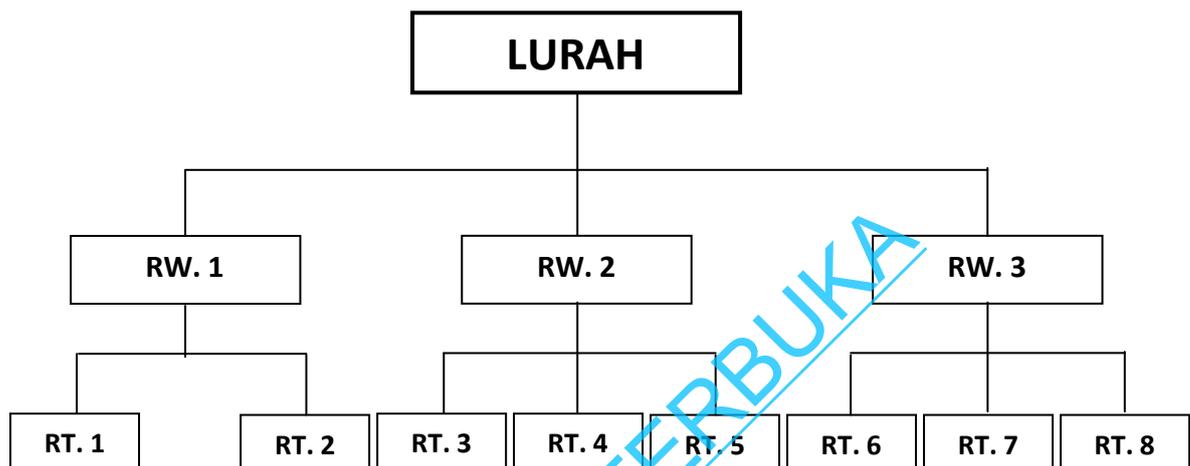


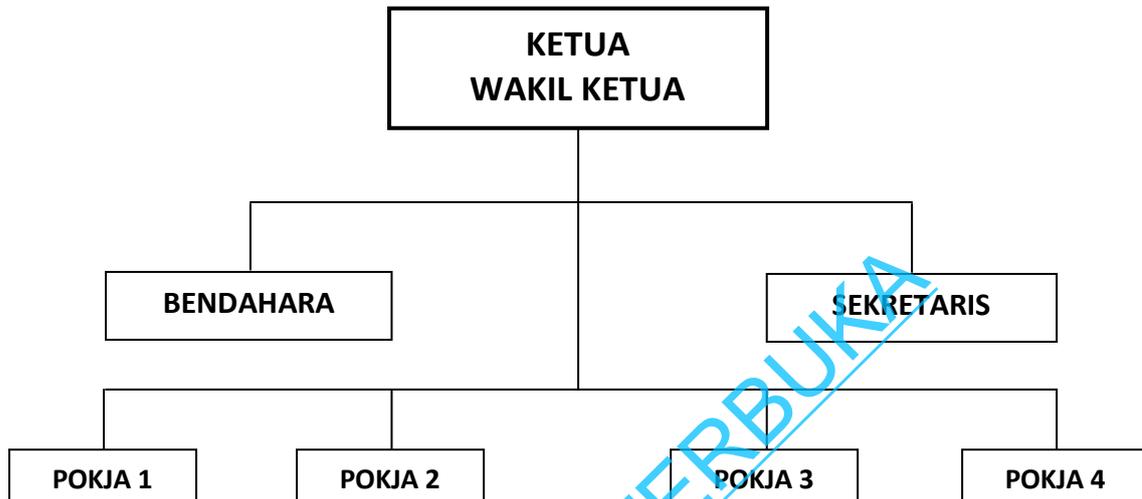
1. Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM  
Pembinaan Hukum, Advokasi dan HAM
2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
3. Bidang Pemberdayaan Wanita, Kependudukan Lingkungan Hidup dan Kepariwisata
4. Bidang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

## STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN

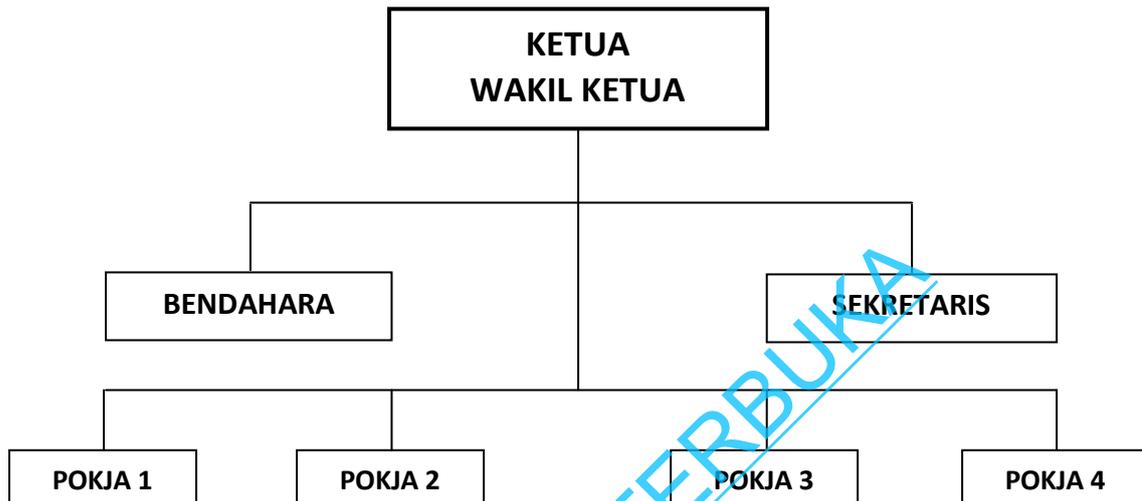


1. Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM  
Pembinaan Hukum, Advokasi dan HAM
2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
3. Bidang Pemberdayaan Wanita, Kependudukan Lingkungan Hidup dan Kepariwisata
4. Bidang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

**STRUKTUR ORGANISASI RT/ RW**

**STRUKTUR ORGANISASI PKK KECAMATAN**

- POKJA I P4, Gotong Royong  
POKJA II Pendidikan dan Keterampilan  
Pengembangan Kehidupan  
POKJA III Pangan, Sandang  
POKJA IV Kesehatan  
Kelestarian Lingkungan Hidup  
Perencanaan Sehat

**STRUKTUR ORGANISASI PKK KELURAHAN**

- POKJA I P4, Gotong Royong
- POKJA II Pendidikan dan Keterampilan  
Pengembangan Kehidupan
- POKJA III Pangan, Sandang
- POKJA IV Kesehatan  
Kelestarian Lingkungan Hidup  
Perencanaan Sehat

# KUESIONER

## PENGARUH KOORDINASI DAN KOMUNIKASI CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pangkalpinang yang sedang melakukan penelitian mengenai permasalahan di atas. Saya sangat mengharapkan kesediaan anda untuk dapat berpartisipasi dalam penelitian ini, hasil penelitian ini akan dipergunakan sebagai bahan kajian ilmiah. Saya harapkan dalam pengisian kuesioner ini dapat memberikan jawaban secara lengkap dan objektif dan saya menjamin kerahasiaan data pribadi anda. Atas kesediaan dan kerjasamanya dalam penelitian ini saya ucapkan terima kasih.

### Petunjuk Pengisian :

1. Baca setiap pertanyaan dan pernyataan dengan teliti.
2. Pada pertanyaan data diri responden, isilah titik-titik dengan menggunakan huruf kapital dan berilah tanda ( ✓ ) pada jawaban yang menurut anda paling sesuai.
3. Berilah tanda ( ✓ ) pada jawaban yang menurut anda paling mewakili setiap pernyataan.
4. Keterangan :  
SS = Sangat Setuju  
S = Setuju  
KS = Kurang Setuju  
TS = Tidak Setuju  
STS = Sangat Tidak Setuju

### Data diri responden :

Nama Lengkap : .....

Pendidikan :  SD  SLTP  SLTA  S1  S2  S3

Pekerjaan :  Camat  Sie Trantib  Sie Pemerintahan  Kapolsek  
 Sie Unit Bimas  Perangkat Kelurahan  Pengurus RW  
 Pengurus RT  Pengurus Karang Taruna  Kepala Keluarga  
 PKK Kecamatan  PKK Kelurahan  Sekcam

T. Tangan : .....

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Setujukah anda bila terdapat kewenangan camat dalam koordinasi dengan mitra kerjanya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat.					
2.	Setujukah anda bila ada kesepakatan kerja dengan instansi lain dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan.					
3.	Setujukah anda bila ada pedoman kerja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang jelas di Kecamatan Bukit Intan.					
4.	Setujukah anda bila ada pertemuan rutin bulanan di Kecamatan Bukit Intan.					
5.	Setujukah anda perlu adanya kemampuan Camat untuk membahas dan menanggulangi masalah kamtibmas.					
6.	Setujukah anda perlu adanya daya tarik Camat sehingga masalah yang dibahas menjadi interes masyarakat.					
7.	Setujukah anda perlu adanya kekuatan dan otoritas Camat untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam bidang kamtibmas.					
8.	Setujukah anda perlu adanya suatu manfaat dari penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan.					
9.	Setujukah anda perlu adanya fasilitas dan modal dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan.					
10.	Setujukah anda perlu adanya sikap yg baik aparat dalam pelayanan penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan.					
11.	Setujukah anda Adanya keinginan/partisipasi dari masyarakat terhadap pelayanan penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan.					
12.	Setujukah anda adanya kemajuan dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan merupakan tugas pembangunan organisasi.					

## Lampiran 16

Nama : ANDI ROZANO, SH  
Jabatan : Camat Bukit Intan  
Tanggal wawancara : 28 Mei 2012  
Jam : 08.00 wib  
Tempat : Kantor Camat Bukit Intan

**Hasil wawancara dengan Camat:**

Tanya : Menurut Bapak, perlukah Terdapat kewenangan dalam koordinasi antara Camat Bukit Intan dengan mitra kerjanya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya ?

Jawab : Menurut saya hal itu sangat perlu karena dengan kewenangan yang ada saya dapat mengundang seluruh mitra kerja saya untuk berkoordinasi tentang masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat dalam wilayah kerja saya.

Tanya : Menurut Bapak, perlukah Pelaksanaan kewenangan kerja yang sangat jelas dan tegas dalam melaksanakan tugas di kecamatan ?

Jawab : Menurut saya, kewenangan yang diberikan kepada seorang Camat untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya harus jelas dan tegas sehingga apa yang dilaksanakannya tidak menyimpang dari tugas yang diberikan dan juga perlu ketegasan sehingga seluruh komponen yang berada dikecamatan dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan apabila terjadi penyimpangan dapat ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanya : Menurut Bapak, perlukah kesepakatan kerja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan ?

Jawab : Menurut saya, kesepakatan kerja sangat perlu di dalam melaksanakan tugas dilapangan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya kesepakatan kerja kita

dapat mengetahui apa yang menjadi bagian tugas kita dan apa yang menjadi bagian tugas orang lain.

Tanya : Menurut Bapak, Setujukah bila ada pertemuan rutin bulanan di Kecamatan Bukit Intan ?

Jawab : Menurut saya, perlu. Hal ini gunanya agar adanya kekompakan dengan mitra kerja yang lain dalam melaksanakan tugas dilapangan. Dengan adanya pertemuan rutin tersebut dapat dihindari adanya miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Tanya : Setujukah anda perlu adanya kemampuan seorang Camat untuk membahas dan menanggulangi masalah kamtibmas ?

Jawab : Menurut saya setuju. Seorang Camat harus mempunyai kemampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan dilapangan. Dalam hal perencanaan, seorang Camat diharapkan memiliki ide yang cemerlang dan dalam hal pelaksanaan dia mampu menanggulangi masalah yang ada dimasyarakatnya.

Tanya : Setujukah anda perlu adanya daya tarik Camat sehingga masalah yang dibahas menjadi interes masyarakat ?

Jawab : Daya tarik seorang Camat merupakan hal yang penting dalam melaksanakan tugas dilapangan. Dengan adanya daya tarik Camat, masyarakat akan termotivasi untuk bersama-sama dengan Camat menaggulangi masalah-masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi diwilayah kerjanya.

Tanya : Setujukah anda perlu adanya kekuatan dan otoritas Camat untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam bidang kamtibmas ?

Jawab : Setuju. Seorang Camat harus memiliki kekuatan dan otoritas dalam mengajak seluruh komponen yang ada diwilayahnya untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya. Dan apabila terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat, Camat memiliki kekuasaan untuk menganggulangnya bersama aparat keamanan lainnya yang ada di kecamatan.

Tanya : Setujukah anda perlu adanya suatu manfaat dari penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bukit Intan.

Jawab : Saya sangat setuju adanya manfaat itu dan manfaat itu hendaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan tersebut.

Tanya : Fasilitas dan modal apa yang diperlukan untuk menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Bapak ?

Jawab : Yang paling diperlukan adalah dana untuk membangun fasilitas dan juga dapat digunakan untuk biaya operasional lapangan.

Tanya : Menurut Bapak Sikap apa yang diperlukan dalam melayani masyarakat yang ada di lingkungan Bapak ?

Jawab : Yang utama adalah keterbukaan dan sikap mengayomi agar masyarakat tidak merasa takut dalam berurusan dengan pihak kecamatan disamping itu dapat tercipta rasa kekeluargaan yang baik antara Camat dengan warga masyarakatnya.

Tanya : Partisipasi masyarakat yang bagaimana yang dikehendaki dari masyarakat ?

Jawab : Yang terpenting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal ini dengan ikut serta dalam kegiatan siskamling.

Tanya : Kemajuan yang bagaimana yang diharapkan Bapak dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Bapak?

Jawab : Yang terpenting adalah masyarakat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari hari dan dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa takut, was-was dan cemas.

Nama : HERBANU, SH  
Jabatan : Kapolsek Bukit Intan  
Tanggal wawancara : 28 Mei 2012  
Jam : 10.00 wib  
Tempat : Kantor Polsek Bukit Intan

**Hasil wawancara dengan Kapolsek:**

1. Kewenangan yang bagaimana yang sebaiknya dimiliki oleh Camat dan berapa besar pengaruhnya kepada masyarakat ?

Kewenangan yang sesuai dengan Tupoksinya sebagai koordinator dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pendelegasian kewenangan kebawah sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat terwujudnya pelayanan prima sampai kelapisan masyarakat paling bawah secara sinergi.

2. Kesepakatan kerja yang bagaimana yang diperlukan oleh Camat agar pelaksanaan tugasnya dapat terlaksana dengan baik ?

Adanya satu garis komando terarah yang terlaksana di kantor Camat serta feedback yang baik yang disepakati oleh seluruh aparat yang ada di wilayah kecamatan.

3. Pedoman kerja yang bagaimana yang dimiliki oleh Camat agar ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat terwujud dengan baik ?

Selalu mengadakan pertemuan/koordinasi/komunikasi berjenjang secara periodik antara Camat dengan Lurah, Lurah dengan RW, RW dengan RT serta sesekali Camat mengadakan kunjungan kemasyarakatan untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat.

4. Berapa kali pertemuan rutin bulan yang sebaiknya diadakan oleh Camat ?

Sebaiknya 2 (dua) kali dalam sebulan yaitu di minggu kedua dan keempat.

5. Kemampuan yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Camat dalam melaksanakan tugasnya ?

Kepemimpinan yang tegas namun harus dilandasi dengan kearifan dan kebijaksanaan.

6. Daya tarik yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Camat dalam bertugas ?

Daya tarik yang berwibawa dan berkharisma.

7. Kekuatan dan otoritas yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Camat agar masyarakat berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya ?

Kekuatan dan otoritas Camat dalam mengatur RT/RW sebagai aparat pembantu Camat yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan dengan demikian diharapkan mereka dapat berperan aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.

8. Manfaat yang bagaimana yang diinginkan masyarakat terhadap Camat dalam terciptanya ketentraman dan ketertiban di lingkungannya ?

Dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat diharapkan ada timbal balik dari Camat terhadap perkembangan pembangunan serta adanya kepedulian sosial terhadap keadaan masyarakat.

9. Fasilitas dan modal apakah yang diperlukan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dilingkungan ?

Terbentuknya fasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat/keluhan. Sebagai wadah untuk berembuk dan menyelesaikan permasalahan serta modalnya adalah saling menghargai serta saling memiliki antar anggota masyarakat

10. Sikap aparat yang bagaimana yang diinginkan masyarakat dalam melayani masyarakat ?

Sikap aparat yang tanggap, jujur, cepat dan adil serta dapat memberikan pelayanan yang prima.

11. Keinginan dan partisipasi apakah yang diperlukan dari masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan ?

Rasa memiliki, kepedulian dan pengabdian terhadap lingkungan disamping itu partisipasinya dalam hal koordinasi dan perwujudannya dalam bentuk nyata serta ikut siskamling, dan lain lain.

12. Kemajuan yang bagaimana yang diinginkan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat ?

Terciptanya sistem koordinasi yang terarah, cepat dan tanggap dalam menaggulangi isu maupun kejadian yang dapat merusak kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Nama : SYAIFUL AKBARI, Sip, MSi  
Tanggal wawancara : 29 Mei 2012  
Jam : 08.00 wib  
Tempat : Kelurahan Semabung Lama Tr.06 No.204 Kec. Bukit Intan

### **Hasil wawancara dengan masyarakat**

1. Kewenangan yang bagaimana yang sebaiknya dimiliki oleh Camat dan berapa besar pengaruhnya kepada masyarakat ?

Seorang Camat wajib diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya agar dia dapat bekerja dengan baik dan kewenangan itu hendaknya tertulis dan berdasarkan peraturan yang berlaku umpamanya kewenangan untuk koordinasi dengan kelurahan. Hal ini dilaksanakan agar pelaksanaan tugas dapat optimal.

2. Kesepakatan kerja yang bagaimana yang diperlukan oleh Camat agar pelaksanaan tugasnya dapat terlaksana dengan baik ?

Kesepakatan kerja yang diperlukan oleh Camat dalam melaksanakan tugasnya dapat berupa MOU dengan mitra kerjanya dan juga masyarakat.

3. Pedoman kerja yang bagaimana yang dimiliki oleh Camat agar ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat terwujud dengan baik ?

Pedoman kerja yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan demikian maka Camat melaksanakan tugas berdasarkan peraturan tersebut dan tidak menyimpang.

4. Berapa kali pertemuan rutin bulan yang sebaiknya diadakan oleh Camat ?

Pertemuan rutin yang dilakukan oleh Camat minimal sekali dalam sebulan dan bisa bertambah apabila dianggap perlu.

5. Kemampuan yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Camat dalam melaksanakan tugasnya ?

Kemampuan memimpin yang tinggi dan berwibawa, bijaksana dalam mengambil keputusan.

6. Daya tarik yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Camat dalam bertugas ?

Daya tarik yang sesuai dengan aturan. Jangan sampai berlebihan dan menyimpang dari tujuan organisasi.

7. Kekuatan dan otoritas yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Camat agar masyarakat berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya ?

Kekuatan dan otoritas untuk memaksa masyarakat agar secara bersama-sama dapat menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.

8. Manfaat yang bagaimana yang diinginkan masyarakat terhadap Camat dalam terciptanya ketentraman dan ketertiban di lingkungannya ?

Yang penting masyarakat merasa aman dan nyaman di lingkungannya. Jangan sampai sering terjadi keributan dan gangguan keamanan lainnya.

9. Fasilitas dan modal apakah yang diperlukan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dilingkungan ?

Fasilitas yang berupa poskamling, dana untuk membantu peralatan dan dana untuk operasional.

10. Sikap aparat yang bagaimana yang diinginkan masyarakat dalam melayani masyarakat ?

Sikap santun dan bijaksana sangat diharapkan masyarakat kepada aparat kecamatan. Jangan sampai masyarakat dipersulit apa bila minta bantuan kepada Camat dan aparat kecamatan lainnya.

11. Keinginan dan partisipasi apakah yang diperlukan dari masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan ?

Masyarakat berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya dengan cara mengadakan ronda keliling kampung.

12. Kemajuan yang bagaimana yang diinginkan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat ?

Masyarakat mengharapkan setiap RT ada Poskamling dan masyarakat bergantian melaksanakan Siskamling setiap malam.

Nama : Suci Setiawati  
Tanggal wawancara : 30 Mei 2012  
Jam : 08.00 wib  
Tempat : Kantor Camat Bukit Intan

### Hasil wawancara dengan PKK Kelurahan

1. Kewenangan yang bagaimana yang sebaiknya dimiliki oleh Camat dan berapa besar pengaruhnya kepada masyarakat ?

Kewenangan untuk mengayomi masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dalam bekerja dan berkehidupan bermasyarakat. Pengaruhnya sangat besar karena masyarakat dapat mencari nafkah tanpa rasa takut terjadinya gangguan keamanan ketentraman.

2. Kesepakatan kerja yang bagaimana yang diperlukan oleh Camat agar pelaksanaan tugasnya dapat terlaksana dengan baik ?

Kesepakatan untuk saling mendukung antara Camat dengan masyarakatnya dalam setiap kegiatan yang menyangkut masyarakat. Hendaknya Camat untuk saling berkoordinasi dengan aparat vertikal lainnya dan masyarakatnya. Dengan koordinasi yang baik akan mempermudah bagi Camat dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pedoman kerja yang bagaimana yang dimiliki oleh Camat agar ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat terwujud dengan baik ?

Pedoman kerja yang telah dituangkan dalam peraturan pemerintah sehingga sehingga akan jelas tugas yang akan dilaksanakan oleh Camat. Apa bila Camat menyimpang dari pedoman kerja tersebut maka Camat akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Berapa kali pertemuan rutin bulan yang sebaiknya diadakan oleh Camat ?

Pertemuan rutin yang dilakukan oleh Camat minimal sekali dalam sebulan asalkan pertemuan itu dilaksanakan dengan efektif.

5. Kemampuan yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Camat dalam melaksanakan tugasnya ?

Kemampuan manajerial yang baik yang berpedoman dengan peraturan pemerintah.

6. Daya tarik yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Camat dalam bertugas ?

Pandai bergaul dan pandai bersosialisasi sehingga Camat dapat diterima dengan baik dalam melaksanakan tugas kemasyarakatannya.

7. Kekuatan dan otoritas yang bagaimana yang harus dimiliki oleh Camat agar masyarakat berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya ?

Kekuatan dan otoritas untuk menggerakkan masyarakat agar berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungannya. Misalnya Tamu wajib lapor 1 X 24 jam.

8. Manfaat yang bagaimana yang diinginkan masyarakat terhadap terhadap Camat dalam terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungannya ?

Apabila Camat dan masyarakat bekerja sama dengan baik maka manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Misalnya tidak terjadi pencurian dan lain sebagainya

9. Fasilitas dan modal apakah yang diperlukan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dilingkungan ?

Fasilitas dan modal dari pemerintah dan masyarakat yang saling menutupi guna menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Misalnya membangun siskamling dengan dana bantuan pemerintah dan swadaya gotong royong dari masyarakat

10. Sikap aparat yang bagaimana yang diinginkan masyarakat dalam melayani masyarakat ?

Sikap bersahabat dan peduli terhadap masyarakatnya sehingga masyarakat tidak takut untuk melaporkan suatu kejadian gangguan keamanan yang terjadi diwilayahnya.

11. Keinginan dan partisipasi apakah yang diperlukan dari masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan ?

Masyarakat berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya dengan cara mengadakan Siskamling baik secara bergantian menjaganya ataupun mengupah penjaga malam.

12. Kemajuan yang bagaimana yang diinginkan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat ?

Agar setiap tahun terjadi penurunan jumlah kejadian gangguan keamanan dan bila perlu tidak terjadi lagi gangguan keamanan umpamanya pencurian, perkelahian antar warga dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS TERBUKA

## DARTAR HASIL PENILAIAN KUESIONER

NO	KELOMPOK	NAMA	PENDIDIKAN	JAWABAN											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kecamatan	Andi Rozano, SH	S1	5	2	3	5	5	3	5	5	4	4	4	4
2		M. Fajri Alzulami	S1	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4
3		M.Nasir	SLTA	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
4		Kamasri	SLTA	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4
5	Polsek	Herbanu, SH	S1	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4
6		Catur Waskito	SLTA	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5
7		Bambang Bekti. S	SLTA	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5
8	Kelurahan	Hermawan Wijaya, SH	S1	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	3	4
9		Tonny Juniardi,SP	S1	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4
10		Jonson L,SKM	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
11		Kaejuni, Sip	S1	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4
12		Abdul Rauf, SH	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13		Syafridamsyah	SLTA	4	4	3	4	5	3	4	4	4	3	4	5
14		Sukardi	SLTA	5	4	5	4	3	4	3	4	3	4	5	5
15		Karlina	SLTA	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	P
16		Hairil Wathon	SLTA	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4
17		Syafrudin Mas'ud	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18		Samsumin. S	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19		Ahmad Sukandar	SLTA	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4
20		Suradi	SLTA	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4
21		Dlfian Jhon	SLTA	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4
22	RW	Dasinar A, SH	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23		Baharuddin, SE	S1	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4
24		Mukhlis,SE	S1	4	3	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4
25		Marini, SE	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26		Destuti,SH	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

27		Manden Munthe,SH	S1	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
28		Titik	SLTA	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4
29		Sri	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30		Isman Musrihadi	SLTA	4	4	4	3	3	2	3	3	3	4	4	4
31		Royani	SLTA	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32		Indra Kelana	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33		Normada	SLTA	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4
34		Sri Sutarmi	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35		Dhe Rizky Ananda	SLTA	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4
36		Rizky Wardianti	SLTA	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	3
37		Bella Andini	SLTA	4	4	5	3	5	4	4	4	4	4	5	5
38		Asbah	SLTA	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	3
39		Tjong Nan Fo	SLTA	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
40		Sendri Supriyanto	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41		M.Ridwan	SLTA	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4
42		Arda	S1	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
43	RT	Suwandi, SE	S1	5	4	3	2	2	3	4	4	3	4	3	4
44		Syarif, ST	S1	4	5	5	4	4	4	4	4	5	3	5	4
45		Rahendris, SH	S1	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5
46		Syamsul Fahmi, SH	S1	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
47		Ira, SE	S1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
48		H. Syamsir Syarief	SLTA	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4
49		Marsandi M	SLTA	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5
50		Riyan Sumaysari	SLTA	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
51		Nurhikmah	SLTA	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4
52		M. Thamrin	SLTA	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4
53		Indah Prasetyawati	SLTA	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
54		Fabriyansyah	SLTA	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5
55		Rika	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56		Jefri	SLTA	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5

57		Himawan	SLTA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58		Andi Fahrizal	SLTA	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5
59		Budiono	SLTA	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4
60		Suparlan	SLTA	4	3	4	5	5	3	3	4	3	5	4	4
61		Asmiyah	SLTA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
62		Firdaus Darmanto	SLTA	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4
63		Jainatun	SLTP	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4
64	PKK	Dwiyanti A, SH	S1	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4
65		Devia Yunita,SE	S1	4	3	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4
66		Masitoh, SE	S1	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4
67		Laila, SE	S1	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
68		Suci Setiawati	SLTA	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
69		Zaiyuni	SLTA	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
70		Viesca Dyanti	SLTA	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4
71		Yunita Ramasari	SLTA	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	5	5
72	Karang Taruna	Ahmad Ihsan, SE	S1	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2
73		Langen Lastry, S.Sos	S1	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
74		Agus Setiawan, SE	S1	5	4	4	4	4	3	5	5	5	3	5	4
75		Hendri	SLTA	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5
76		M. Syafari	SLTA	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5
77		Irwanto	SLTA	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
78		Rangga Sumardiko	SLTA	4	3	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4
79	Ka.Keluarga	Syaiful Akbari, Sip, Msi	S2	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4
80		Irwansyah, SE,MM	S2	4	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4
81		Zulkodri, SE, MM	S2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4
82		Usman, S.Ip	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
83		Fajri Djagahitam, SH	S1	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4
84		M. Syaifudin Zuhri, S.Ip	S1	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3
85		Riduan, SH	S1	5	4	4	3	5	4	5	4	4	5	5	5
86		Ihsani, SE	S1	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4

87	Yudi Endang Sondona	SLTA	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
88	Netty Setiawati	SLTA	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
89	Eva M.S	SLTA	4	4	5	3	5	4	4	4	5	4	4	4
90	Indah Y	SLTA	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
91	Yoyon	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	Muaim Yuri	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	Des	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	Hamzah	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	Sopian	SLTA	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4
96	I Made Budiasa	SLTA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
97	Hermanto	SLTP	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	5
98	Baharuddin	SLTP	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4
99	Rasidi	SLTP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
JUMLAH			424	402	429	404	425	390	418	420	413	413	427	408

UNIVERSITAS TERBUKA